



Bab 7 **RENCANA PEMBANGUNAN** **INFRASTRUKTUR** **BIDANG CIPTA KARYA**

Di bab ini akan menjelaskan terkait strategi pembiayaan di Sektor Pengembangan Kawasan Permukiman, Sektor Penanganan Bangunan dan Lingkungan, Sektor Pengembangan SPAM, dan Sektor Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

7.1 SEKTOR PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman didefinisikan sebagai bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau perdesaan. Kegiatan pengembangan permukiman terdiri dari pengembangan permukiman kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Pengembangan permukiman kawasan perkotaan terdiri dari pengembangan kawasan permukiman baru dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, sedangkan untuk pengembangan kawasan perdesaan terdiri dari pengembangan kawasan permukiman perdesaan, kawasan pusat pertumbuhan, serta desa tertinggal.

7.1.1 Arahan Kebijakan Pengembangan Permukiman Mengacu Pada Amanat Peraturan Perundangan, antara lain :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun



4. Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

7.1.2 Kondisi Eksisting

Pengembangan kegiatan permukiman merupakan kegiatan utama dalam penataan ruang Kota Palangka Raya. Hal ini sesuai dengan fungsi yang ditetapkan sebagai pusat permukiman perkotaan. Strategi pengembangan diarahkan mengikuti perkembangan perumahan yang telah ada dan pada lahan-lahan yang sesuai untuk pengembangan kegiatan tersebut. Pada kawasan yang sudah terbangun, pengembangan perumahan ditekankan pada perbaikan dan penataan lingkungan dengan pengendalian fisik lingkungan serta penyediaan fasilitas pelayanan.

Sebagian besar wilayah Kota Palangka Raya merupakan dataran rendah yang terdiri daerah rawa dengan ketinggian 0-50 m di atas permukaan laut. Berikutnya hampir seluruh wilayah Kota Palangka Raya dialiri oleh sungai besar maupun sungai kecil yang mengalir dari Utara ke Selatan dengan bermuara di Laut Jawa, yaitu Sungai Kahayan, Sungai Rungan-Manuhing dan Sungai Sabangau.

Pada awalnya Kota Palangka Raya dibangun dari sebuah desa kecil bernama Pahandut, di mana pada mulanya pola pemukiman dimulai dari tepian sungai. Kondisi lingkungan permukiman yang dibangun ditepian Sungai Kahayan, Rungan-Manuhing dan Sabangau dalam bentuk lanting (rumah terapung) dan rumah panggung teridentifikasi terhadap aspek teknis maupun aspek sosial menampakkan kondisi yang kurang sehat. Pola tata ruang yang tidak teratur dan topografi lahan yang tidak sesuai untuk bangunan perumahan di wilayah ini rata-rata tidak memiliki halaman maupun ruang untuk bermain. Perilaku masyarakat dan kebiasaan juga menentukan kualitas sanitasi lingkungan permukiman karena air akan menentukan transmisi penyakit dan penyakit apa yang prevalen diantara mereka. Lingkungan Permukiman di bantaran sungai daerah rawa masalah yang serius yakni mulai dari kurang prasarana dan sarana sanitasi, dimana masyarakat memanfaatkan sungai untuk kegiatan sehari hari .

Saat ini sebagian besar penduduk asli yang tinggal di tepian Sungai Kahayan, yaitu kawasan Pahandut dan kawasan Flamboyan bawah dan sekitarnya telah pindah ke



lokasi lain tetapi lokasi tersebut saat ini dijual dan ditempati oleh suku pendatang suku banjar yang pola kehidupan permukimannya hampir sama dengan suku dayak yang menyukai kehidupan pinggiran sungai. Saat ini kawasan tepian sungai tersebut menjadi kawasan kumuh Kota Palangka Raya.

Teridentifikasi bahwa sebagian besar penduduk yang tinggal dan membangun rumah ditepian sungai tidak memiliki utilitas pribadi seperti WC dan kamar mandi karena budaya dan kebiasaan menggunakan sungai sudah sangat melekat. Sistem pembuangan limbah rumah tangga di wilayah ini sebagian kecil dengan sistem pembuangan limbah secara individual dan konvensional. Sistem individual menggunakan septiktank yang konstruksinya dari kayu ulin yang sengaja dibiarkan berlubang. Data yang didapat dimana air limbah dari mandi, cuci, memasak terdapat 60 % dibuang kesungai atau rawa, dan lain-lain, sedangkan yang telah membuang pada sumur resapan hanya 20 % dan dibuang ke halaman atau dibawah rumah 14% disusul dibuang pada selokan alami tanpa bangunan permanen 6 %.

Bagi warga Kota Palangka Raya yang tinggal pada jalur sungai merupakan urat nadi kehidupan warga sekitar. Selain sebagai sarana transportasi utama yang menghubungkan satu kampung dengan kampung lainnya, satu tempat ke tempat lainnya, sungai diyakini menyimpan pesona keilahian sekaligus ruang sosial.

Keyakinan ini nampak dalam pandangan kosmologi warga bahwa sungai menjadi tempat mengelola dan mengapresiasi kehidupan mereka. Jalur sungai bermakna perjalanan sekaligus pasar, pusat transaksi ekonomi sekaligus medan interaksi sosial. Lihatlah misalnya aktifitas warga yang mandi di sungai, sekaligus menjadi arena pertemuan antar mereka yang kerap mengobrol dan membicarakan persoalan mereka di atas rakit. Selain itu, sungai juga merupakan ladang mencari ikan sekaligus tempat laku ritual. Namun riwayat mengenai peradaban sungai beserta seluruh kosmologi warganya ini segera nampak berubah bersamaan dengan kehadiran jalan raya darat, yang seringkali dimaknai sebagai jalur baru kemajuan.



Gambar 7.1 Kondisi permukiman di Sempadan Sungai Kota Palangka Raya

Permukiman pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni kawasan permukiman perkotaan yang dapat diindikasikan juga sebagai ibukota kecamatan. Wilayah ini didominasi kegiatan yang difungsikan untuk kegiatan yang bersifat kota dan merupakan orientasi pergerakan penduduk yang ada pada wilayah sekitarnya. Sedangkan kawasan permukiman pedesaan adalah suatu kawasan untuk permukiman pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan sebagian diantaranya memiliki aksesibilitas yang kurang, jumlah sarana dan prasarana penunjang terbatas pada pelayanan kecil.

Tabel 7.1 Tingkat Kepadatan Permukiman Kota Palangka Raya

No	Tingkat Kepadatan	Persebaran
1	Tinggi	Kec. Pahandut
2	Sedang	Kec. Jekan Raya
3	Rendah	Kec. Sebangau, Kec. Rakumpit, Kec. Bukit Batu

Sumber : Hasil Analisa, 2018

Pada dasarnya secara umum kualitas perumahan dan permukiman juga sangat dipengaruhi oleh tingkat keswadayaan dan kemampuan ekonomi masyarakatnya. Namun bagi masyarakat miskin, upaya pemenuhan kebutuhan hunian tetap merupakan suatu hal yang relatif kompleks, karena pada umumnya hunian bagi masyarakat miskin belum dapat sepenuhnya menjadi kebutuhan dasar dan mendesak dibandingkan kebutuhan dasar lainnya seperti pangan, sandang, dan pendidikan. Oleh karena itu, kepada kelompok masyarakat miskin perlu diupayakan kegiatan untuk memberdayakan kemampuan ekonomi masyarakat yang berbasis keswadayaan masyarakat melalui penciptaan usaha ekonomi produktif dengan

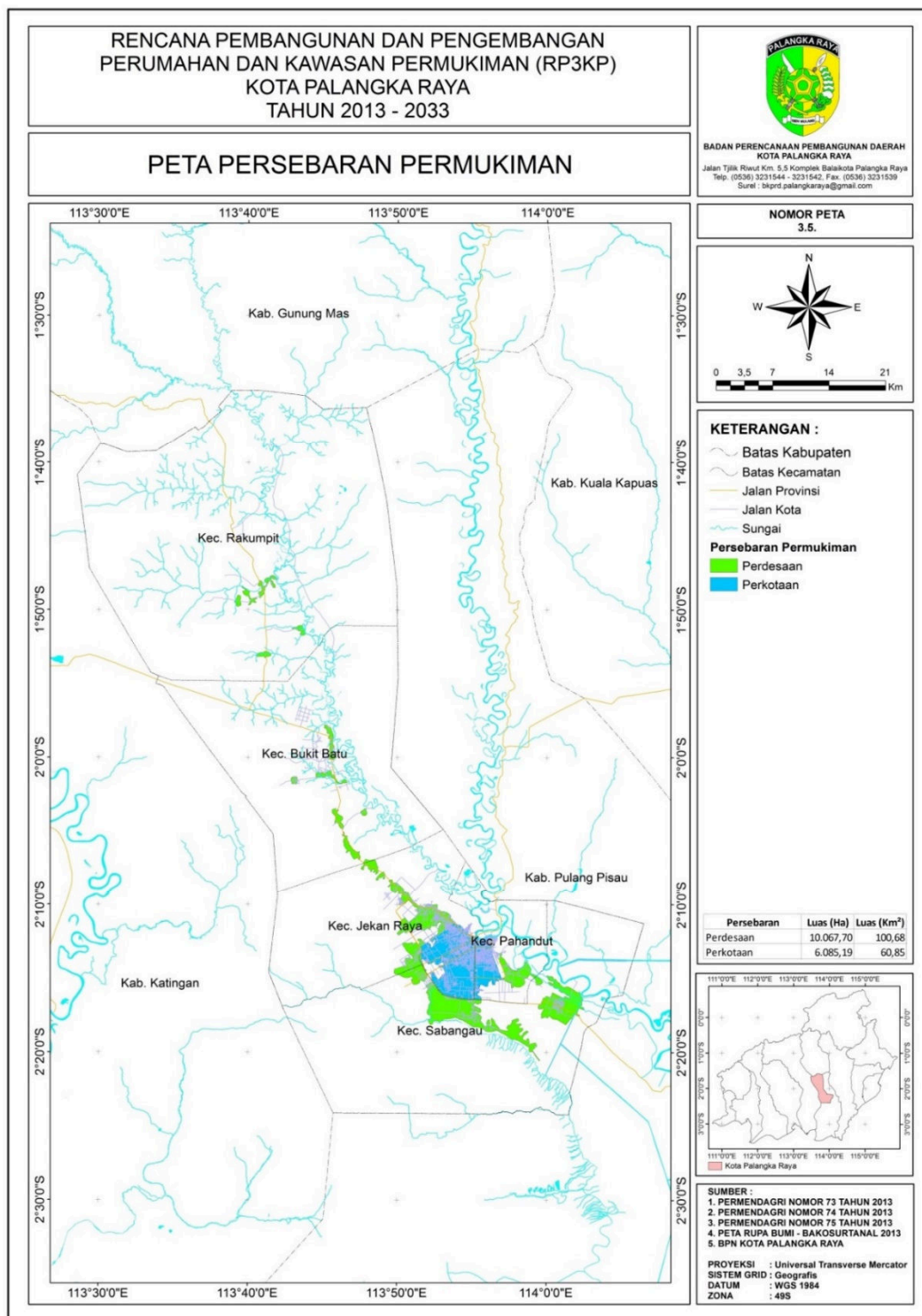


berbagai upaya fasilitas pendampingan masyarakat, yang secara komprehensif tetap dalam kerangka prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di bidang perumahan dan permukiman. Kualitas perumahan yang layak huni dan terjangkau secara ideal perlu didukung dengan kualitas lingkungan permukiman yang lebih luas sebagai satu kesatuan hunian yang tidak terpisahkan guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Kualitas permukiman di perkotaan dan perdesaan diupayakan sedemikian rupa sehingga dapat membantu mengatasi urbanisasi, mendorong pertumbuhan wilayah, mendukung kesalingterkaitan kawasan perkotaan dan perdesaan secara baik, yang sekaligus dapat mewujudkan permukiman di perdesaan yang mendukung perwujudan kawasan perdesaan secara keseluruhan dan berkelanjutan. Pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan secara menyeluruh akan dapat berlangsung lebih efektif apabila terwadahi di dalam permukiman yang sehat secara fisik, emosional, dan spiritual, yang aman dari segi keselamatan dan kepentingan publik, yang harmonis sebagai satuan permukiman yang utuh dan kualitas hubungannya dengan fungsi-fungsi kawasan lainnya serta berkelanjutan dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara keseluruhan.

Tabel 7.2 Kondisi Permukiman Kota Palangka Raya

No	Kecamatan	Deskripsi Kondisi Rumah
1	Pahandut	Rumah dengan kategori permanen dengan kondisi baik
2	Jekan Raya	Rumah dengan kategori permanen dengan kondisi sedang
3	Sebangau	Rumah masih dalam kategori non permanen dengan kondisi relatif sedang
4	Bukit Batu	Rumah masih dalam kategori non permanen dengan kondisi buruk
5	Rakumpit	Rumah dengan kategori non permanen dengan kondisi buruk

Sumber : Hasil Analisa, 2018



Gambar 7.2 Kondisi Rumah di Kota Palangka Raya

Sumber : Dokumen RP3KP



PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA

Tabel 7.3 Potensi Dan Permasalahan Kawasan Permukiman

NO	KAWASAN	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	POTENSI	PERMASALAHAN
1	Kelurahan Kereng Bengkirai	▪ EKONOMI	▪ Kawasan permukiman dan lingkungan perumahan dalam areal perkotaan yang memiliki nilai ekonomis dan atau strategis tinggi.	▪ Mata Pencapaian ▪ Adanya kawasan industry kecil. ▪ Adanya kawasan Perdagangan dan Jasa.	▪ Demaga sungai ▪ Pertanian sayur mayur. ▪ Wisata ▪ Hutan Pendidikan dan penelitian	▪ Infrastruktur Jalan Lingkungan sebagai penunjang kegiatan ekonomi belum memadai. ▪ Tingkat prosentase penduduk miskin relative masih tinggi (47,06%)
		▪ FUNGSI KAWASAN	▪ Kawasan permukiman yang dilengkapi/disertai dengan fungsi khusus dalam skala pembangunan wilayah kota atau wilayah yang lebih luas	▪ Dominasi Peruntukan lahan ▪ Luas area kawasan	▪ Dominasi penggunaan lahan sebagai permukiman dan ladang. ▪ Masih banyaknya lahan yang belum dimanfaatkan.	▪ Sebagian besar masih berupa lahan gambut dan dekat dengan lokasi taman nasional sebangau
		▪ LINGKUNGAN PERMUKIMAN	▪ Kawasan permukiman yang memiliki kondisi lingkungan yang sehat.	▪ Ketersediaan TPS ▪ Ketersediaan Air Bersih ▪ Ketersediaan sanitasi. ▪ Jalan		
		▪ BENCANA	▪ Kawasan permukiman yang potensial terkena bencana (alam maupun konflik sosial) yang perlu diselesaikan		▪ Relatif aman terhadap bencana banjir.	▪ Dekat dengan kawasan hutan sehingga rawan terkena dampak asap dari kebakaran hutan.
		▪ TATA RUANG	▪ Kawasan Permukiman yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang.	▪ Sesuai RTRW ▪ RP3KP ▪ RPIJM		
2	Kelurahan Menteng Baru	▪ EKONOMI	▪ Kawasan permukiman dan lingkungan perumahan dalam perkotaan yang memiliki nilai ekonomis dan dekat pusat pelayanan	▪ Mata Pencapaian ▪ Adanya kawasan industry kecil. ▪ Adanya kawasan Perdagangan dan Jasa.	▪ Sebagai kawasan promosi industry .	▪ Prasarana transportasi masih kurang memadai.
		▪ FUNGSI KAWASAN	▪ Kawasan permukiman yang dilengkapi/disertai dengan fungsi khusus dalam skala pembangunan wilayah	▪ Dominasi Peruntukan lahan. ▪ Luas area kawasan	▪ Dominasi kawasan sebagai kawasan industry dan perumahan. ▪ Masih tersedianya lahan.	Prasarana transportasi masih kurang memadai.



PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
 BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA

NO	KAWASAN	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	POTENSI	PERMASALAHAN
			kota atau wilayah yang lebih luas			
		▪ LINGKUNGAN PERMUKIMAN	▪ Kawasan permukiman yang memiliki kondisi lingkungan yang sehat.	▪ Ketersediaan TPS ▪ Ketersediaan Air Bersih ▪ Ketersediaan sanitasi. ▪ Jalan	Kualitas air bersih layak dikonsumsi.	▪ Ketersediaan TPS kurang memadai. ▪ Drainase masih kurang memadai. ▪ Kondisi jalan kurang baik. ▪ Merupakan kawasan yang direncanakan sebagai area industri
		▪ BENCANA	▪ Kawasan permukiman yang potensial terkena bencana (alam maupun konflik sosial) yang perlu diselesaikan			
		▪ TATA RUANG	▪ Kawasan Permukiman yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang.	▪ Sesuai RTRW ▪ RP3KP ▪ RPIJM	-	-
3	Kelurahan Bukit Tunggal	▪ EKONOMI	▪ Kawasan permukiman dan lingkungan perumahan kumuh dalam areal perkotaan yang memiliki nilai ekonomis dan atau strategis tinggi.	▪ Mata Pencarian ▪ Adanya kawasan industri kecil. ▪ Adanya kawasan Perdagangan dan Jasa.	▪ Tingkat pertumbuhan sector perdagangan dan jasa cukup pesat.	▪ Banyak terdapat bangunan yang menyalahi aturan teknis sehingga menimbulkan kesan kumuh. ▪ Kondisi lebar jalan yang relative sempit.
		▪ FUNGSI KAWASAN	▪ Kawasan permukiman yang dilengkapi/disertai dengan fungsi khusus dalam skala pembangunan wilayah kota atau wilayah yang lebih luas	▪ Dominasi Peruntukan lahan. ▪ Luas area kawasan	▪ Luas lahan kosong masih memadai.	
		▪ LINGKUNGAN PERMUKIMAN	▪ Kawasan permukiman yang memiliki kondisi lingkungan yang sehat.	▪ Ketersediaan TPS ▪ Ketersediaan Air Bersih ▪ Ketersediaan sanitasi. ▪ Jalan	Pesatnya penyediaan permukiman oleh swasta yang ditunjang oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai.	Pertumbuhan kawasan terbangun yang relative cepat dan tidak terkontrol.
		▪ BENCANA	▪ Kawasan permukiman yang potensial terkena bencana (alam maupun		-	-



PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
 BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA

NO	KAWASAN	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	POTENSI	PERMASALAHAN
			konflik sosial) yang perlu diselesaikan			
		▪ TATA RUANG	▪ Kawasan Permukiman yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang.	▪ Sesuai RTRW ▪ RP3KP ▪ RPIJM		
4	Kawasan Mendawai	▪ EKONOMI	▪ Kawasan permukiman dan lingkungan perumahan kumuh dalam areal perkotaan yang memiliki nilai ekonomis dan atau strategis tinggi.	▪ Mata Pencapaian ▪ Adanya kawasan industri kecil. ▪ Adanya kawasan Perdagangan dan Jasa.	▪ Dekat dengan pusat pelayanan ▪ Dekat dengan sumber mata pencaharian	▪ Kondisi jalan lingkungan yang kurang memadai dalam menunjang kegiatan ekonomi.
		▪ FUNGSI KAWASAN	▪ Kawasan permukiman yang dilengkapi/disertai dengan fungsi khusus dalam skala pembangunan wilayah kota atau wilayah yang lebih luas	▪ Dominasi Peruntukan lahan. ▪ Luas area kawasan		▪ Didominasi oleh permukiman kumuh ▪ Luas area permukiman yang dapat dikembangkan terbatas.
		▪ LINGKUNGAN PERMUKIMAN	▪ Kawasan permukiman yang memiliki kondisi lingkungan kumuh dan lingkungan yang tidak sehat.	▪ Ketersediaan TPS ▪ Ketersediaan Air Bersih ▪ Ketersediaan sanitasi. ▪ Jalan	▪ Air bersih layak dikonsumsi.	▪ Ketersediaan TPS kurang memadai. ▪ Kondisi Sanitasi lingkungan kurang baik. ▪ Kondisi perkerasan jalan tidak stabil dan tahan lama.
		▪ BENCANA	▪ Kawasan permukiman yang potensial terkena bencana (alam maupun konflik sosial) yang perlu diselesaikan	▪ Kebakaran lahan gambut ▪ Kebakaran akibat kepadatan bangunan ▪ Banjir		▪ Rawan Banjir ketinggian air mencapai 30 cm hingga 1,5 meter dan sudah mulai masuk ke dalam rumah
		▪ TATA RUANG	▪ Kawasan Permukiman yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang.	▪ Sesuai RTRW ▪ RP3KP ▪ RPIJM		
5	Kasiba-Lisiba (Jl. Mahir Mahar)	▪ EKONOMI	▪ Kawasan permukiman dan lingkungan perumahan perkotaan yang memiliki nilai ekonomis atau strategis tinggi terhadap perkembangan kota	▪ Mata Pencapaian ▪ Adanya kawasan industri kecil. ▪ Adanya kawasan Perdagangan dan Jasa.	Harga lahan bervariasi	



PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
 BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA

NO	KAWASAN	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	POTENSI	PERMASALAHAN
		▪ FUNGSI KAWASAN	▪ Kawasan yang disiapkan sebagai area pengembangan permukiman	▪ Dominasi Peruntukan lahan. ▪ Luas area kawasan	Sebagai kawasan terbangun permukiman	Konversi lahan
		▪ LINGKUNGAN PERMUKIMAN	▪ Kawasan permukiman yang memiliki kondisi lingkungan sehat dan seimbang	▪ Ketersediaan TPS ▪ Ketersediaan Air Bersih ▪ Ketersediaan sanitasi. ▪ Jalan	▪ Ketersediaan lahan ▪ akses	Jauh dari pusat pelayanan
		▪ BENCANA	▪ Kawasan permukiman yang potensial terkena bencana (alam maupun konflik sosial) yang perlu diselesaikan	Kebakaran gambut		Kabut asap Rawan Kejahatan
		▪ TATA RUANG	▪ Kawasan Permukiman yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang, dan kebijakan pembangunan.	▪ Sesuai RTRW ▪ RP3KP ▪ RPIJM	▪ Dapat menampung sekitar 2000 -3000 unit rumah ▪ Terdapat aksesibilitas	Masih berupa lahan kosong Tidak terdapat pusat pelayanan

Sumber : Hasil Analisa, 2018



7.1.3 Sasaran Program Kegiatan Permukiman

Berdasarkan hasil analisa komparasi antar berbagai kebijakan pembangunan infrastruktur bidang cipta karya di Kota Palangka Raya, Setelah melalui tahapan analisis kebutuhan untuk mengisi kesenjangan antara kondisi eksisting dengan kebutuhan maka pe rlu disusun usulan program dan kegiatan. Namun usulan program dan kegiatan terbatas oleh waktu dan kemampuan pendanaan pemerintah kabupaten/kota. Sehingga untuk jangka waktu perencanaan lima tahun dalam RPIJM dibutuhkan suatu kriteria untuk menentukan prioritas dari tahun I sampai V. Setelah memperhatikan kriteria kesiapan maka dapat dirumuskan sasaran program sektor pengembangan kawasan permukiman seperti pada Rencana Program Pengembangan Kawasan Permukiman pada lampiran.

Adapun untuk usulan pembiayaan dapat dijabarkan usulan pembiayaan baik dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN, maupun dari masyarakat dan swasta, sesuai dengan kemampuan pembiayaan pemerintah kabupaten/kota.

Tabel 7.4 Matriks Sasaran Program Pengembangan Permukiman

No	Uraian Sasaran Program	Total Luas Kawasan	Sasaran Program (Tahun)				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Penyusunan dokumen RP2KPKP	-	-	1 dokumen	-	-	-
2	Peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan	Ha	-	64,91 Ha	19,07 Ha	6,28	5,94
3	Peningkatan kualitas permukiman perdesaan potensial (Kawasan Agropolitan)	6 Kawasan	-	- 1 dokumen	2 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan

Sumber : Hasil Analisa, 2018

7.1.4 Usulan Program Kegiatan Permukiman

Tabel 7.5 Usulan Program Sektor Pengembangan Permukiman

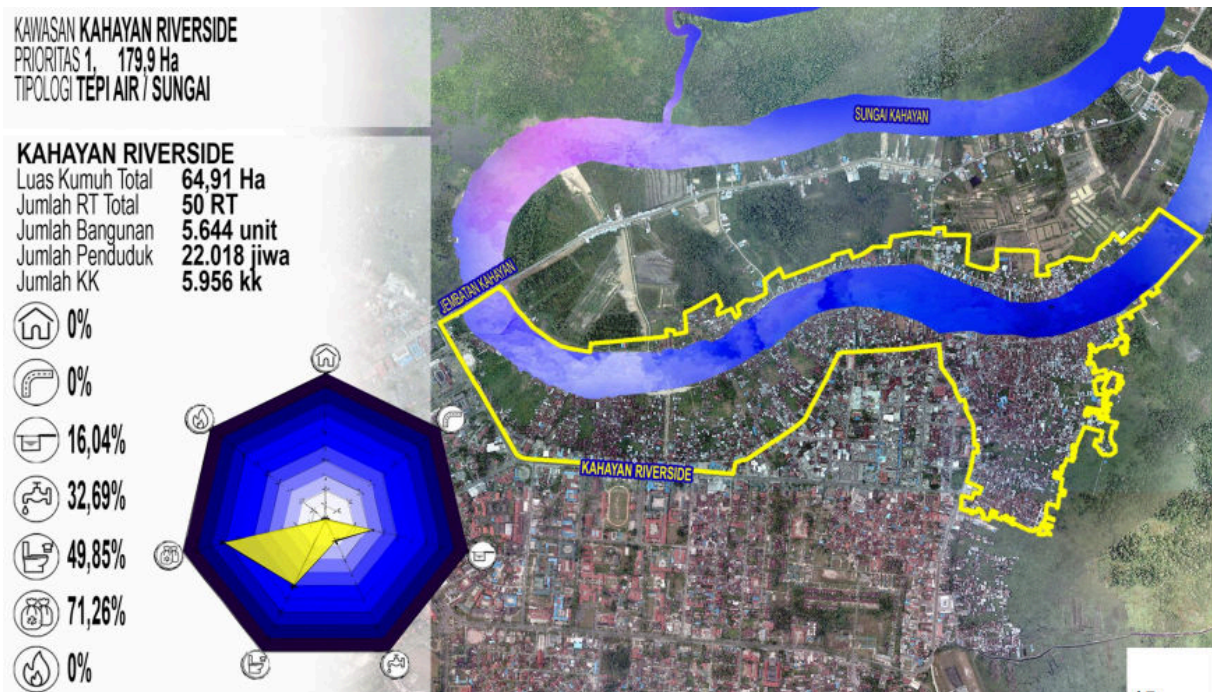
No	Usulan Kegiatan	Lokasi	Tahun	Volume	Satuan	Biaya (Rp 000.000)
1	Penyusunan dokumen RP2KPKP	Kota Palangkaraya	2020	1	Laporan	850
2	Peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan	Kawasan Kumuh Kahayan River Side Blok 1	2020	8,97	Ha	10.565
3	Peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan	Kawasan Kumuh Kahayan River Side Blok 2	2020	16,46	Ha	73.613



PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA

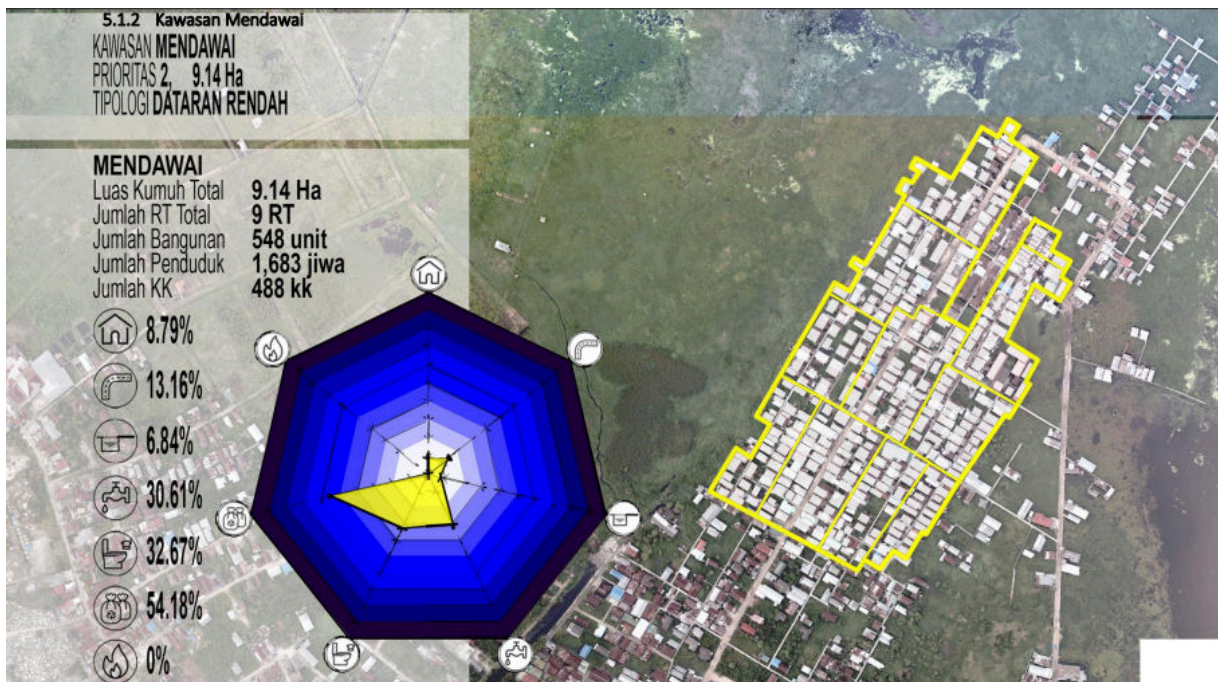
No	Usulan Kegiatan	Lokasi	Tahun	Volume	Satuan	Biaya (Rp 000.000)
4	Peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan	Kawasan Kumuh Kahayan River Side Blok 3	2020	31,75	Ha	37.251
3	Peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan	Kawasan Kumuh Mendawai	2020	9,14	Ha	25.751
4	Peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan	Kawasan Kumuh Menteng	2020	9,33	Ha	13.592
5	Peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan	Kawasan Kumuh Kereng Bangkirai	2020	8,05	Ha	22.951
6	Peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan	Kawasan Kumuh Tumbang Rungan	2020	4,66	Ha	6.250
7	Peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan	Kawasan Kumuh Tangkiling	2020	5,94	Ha	8.364
8	Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Kota Palangka Raya	2020	Kawasan	59	755.979

Sumber : Hasil Analisa, 2018



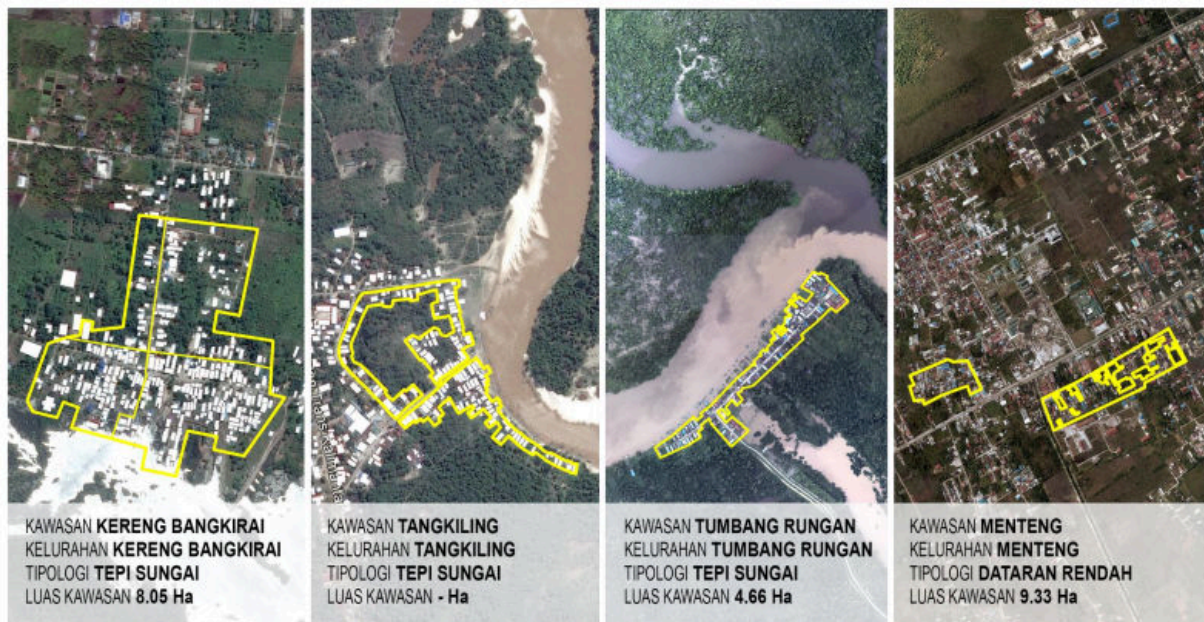
Gambar 7.3 Kawasan Kahayan River Side

Sumber : Memorandum Program Kotaku , 2018



Gambar 7.1 Kawasan Mendawai

Sumber : Memorandum Program Kotaku , 2018



Gambar 7.1 Kawasan Prioritas Rendah

Sumber : Memorandum Program Kotaku , 2018



PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
 BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA

Tabel 7.6 Program Kegiatan Pemukiman

WILAYAH	ASPEK	STRATEGI	PROGRAM STRATEGIS	PELAKU	JANGKA WAKTU 20 TAHUN (2013-2033)				SUMBER DANA
					2013 s/d 2018	2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	
Seluruh kawasan prioritas	Kebijakan	Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan	Program pengembangan perumahan	Dinas PU Cipta Karya	X	X			APBD Kota
			Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu		X	X	X	X	
			Pengembangan penataan lingkungan permukiman, pemantapan standar pelayanan minimal lingkungan permukiman		X	X	X	X	
			Memperjelas status lahan	Dinas PU Cipta Karya/BPN	X	X	X	X	
			Menertibkan status penguasaan lahan yang menjadi aset pemerintah	BPN/ Badan Aset Daerah	X	X		X	
			Memberikan fasilitasi untuk mendapatkan tempat tinggal layak huni		X	X	X	X	
Seluruh kawasan prioritas	Fisik	Penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman	Pengembangan kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba)	Dinas PU Cipta Karya		X	X	X	APBN, APBD Kota/Prov
			Penyediaan tanah siap bangun dan kapling tanah matang, serta penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman		X	X		X	
			Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat		X	X	X	X	
Seluruh kawasan prioritas	Fisik	Mewujudkan pembangunan dan pengembangan	Peningkatan kualitas prasarana dan sarana infrastruktur penunjang permukiman		X	X		X	APBD Kota/Prov



PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
 BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA

WILAYAH	ASPEK	STRATEGI	PROGRAM STRATEGIS	PELAKU	JANGKA WAKTU 20 TAHUN (2013-2033)				SUMBER DANA
					2013 s/d 2018	2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	
		permukiman yang layak huni dan berkeadilan	▪ Menertibkan status penguasaan lahan yang menjadi aset pemerintah		X	X	X	X	
			▪ Pembatasan dan mengendalikan perkembangan permukiman yang berada di sempadan sungai		X	X			
			Memberikan fasilitasi untuk mendapatkan tempat tinggal layak huni		X	X	X		
Seluruh kawasan prioritas	Kebijakan	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan	▪ Revitalisasi kawasan permukiman kumuh	Dinas PU Cipta Karya	X	X		X	APBD Kota
			▪ Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin		X	X	X		
			▪ Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan		X	X	X		
			▪ Penyediaan prasarana dan saran penunjang atau infrastruktur	Dinas PU Cipta Karya/Bina Marga	X	X	X	X	
Seluruh kawasan prioritas	Fisik	Mewujudkan pembangunan dan pengembangan permukiman yang layak huni dan berkeadilan	▪ Menertibkan status penguasaan lahan yang menjadi aset pemerintah		X	X	X	X	APBD Kota/Prov
			▪ Pembatasan dan mengendalikan perkembangan permukiman		X	X	X		



PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
 BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA

WILAYAH	ASPEK	STRATEGI	PROGRAM STRATEGIS	PELAKU	JANGKA WAKTU 20 TAHUN (2013-2033)				SUMBER DANA
					2013 s/d 2018	2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	
			yang berada di sempadan sungai						
			Memberikan fasilitasi untuk mendapatkan tempat tinggal layak huni		X	X	X	X	
Seluruh kawasan prioritas	Sosial	Peningkatan pelayanan publik seperti IMB serta pelayanan terhadap kepemilikan rumah	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	PU, BAPPEDA Masyarakat/ Swasta	X	X			APBD Kota/Prov
			Fasilitasi pemberian kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan perumahan		X	X	X		
			Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran		X	X	X		
			Monitoring dan evaluasi				X		
		Mewujudkan pembangunan dan pengembangan prasarana sanitasi dan penanganan kebersihan	Menyiapkan dukungan infrastruktur permukiman		X				APBD Kota
			Mengembangkan permukiman layak huni dengan sistem sanitasi terpadu		X	X	X		

Sumber : Hasil Analisa, 2018



7.2 SEKTOR PENANGANAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

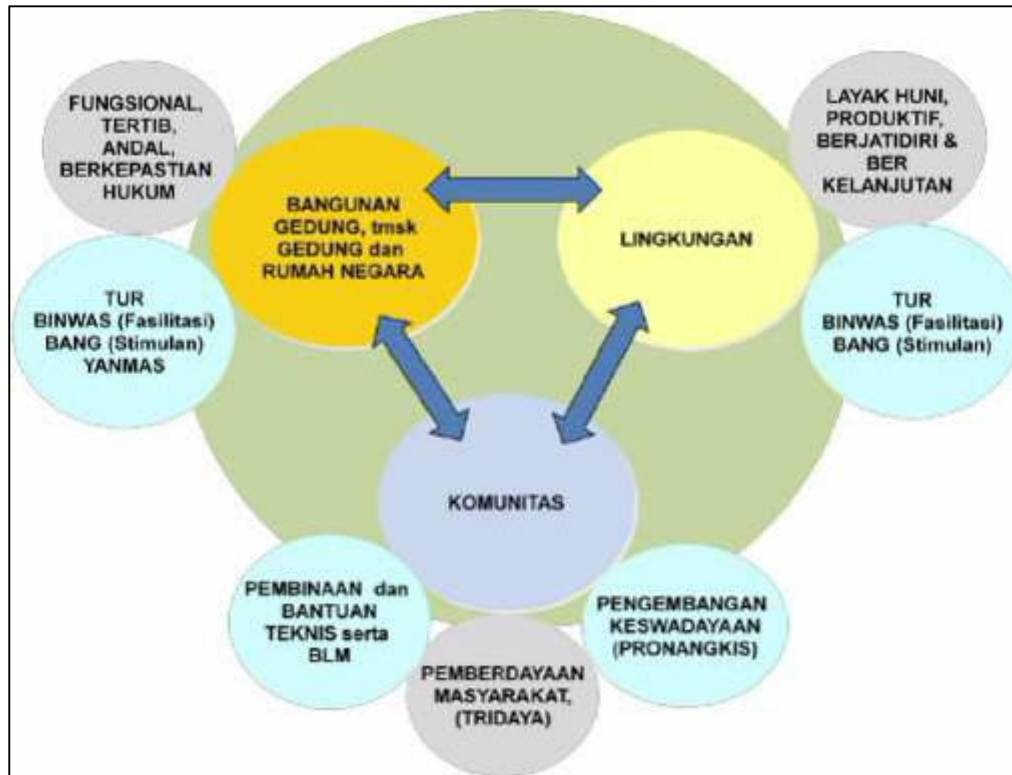
7.2.1 Arah Kebijakan dan Lingkup PBL

Penataan bangunan dan lingkungan adalah serangkaian kegiatan yang diperlukan sebagai bagian dari upaya pengendalian pemanfaatan ruang, terutama untuk mewujudkan lingkungan binaan, baik di perkotaan maupun di perdesaan, khususnya wujud fisik bangunan gedung dan lingkungannya. Kebijakan penataan bangunan dan lingkungan mengacu pada Undang-Undang dan peraturan antara lain :

1. UU No.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. PP 36/2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Permen PU No. 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
5. Permen PU No.14 /PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lingkup.

Tugas dan Fungsi Direktorat PBL (Permen PU No. 8 tahun 2010)

Lingkup tugas dan fungsi dilaksanakan sesuai dengan kegiatan pada sektor PBL, yaitu kegiatan penataan lingkungan permukiman, kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah negara dan kegiatan pemberdayaan komunitas dalam penanggulangan kemiskinan seperti ditunjukkan pada Gambar berikut :



Sumber : Dit. PBL, DJCK, 2012

Gambar 7.2 Lingkup Tugas PBL

Lingkup kegiatan untuk dapat mewujudkan lingkungan binaan yang baik sehingga terjadi peningkatan kualitas permukiman dan lingkungan meliputi:

- a. Kegiatan penataan lingkungan permukiman
 - Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
 - Bantuan Teknis pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - Pembangunan Prasarana dan Sarana peningkatan lingkungan pemukiman kumuh dan nelayan
 - Pembangunan prasarana dan sarana penataan lingkungan pemukiman tradisional
- b. Kegiatan pembinaan teknis bangunan dan gedung
 - Diseminasi peraturan dan perundangannya tentang penataan bangunan dan lingkungan;
 - Peningkatan dan pemantapan kelembagaan bangunan dan gedung;
 - Pengembangan sistem informasi bangunan gedung dan arsitektur;



- Pelatihan teknis
- c. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di perkotaan
 - Bantuan teknis penanggulangan kemiskinan di perkotaan;
 - Paket dan Replikasi

7.2.2 Kondisi Eksisting

Penataan Bangunan dan Lingkungan di wilayah Kota Palangka Raya dilakukan berdasarkan pada Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2001 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), serta dengan mengacu juga pada RTRW Kota Palangka Raya Tahun 2013-2033, di mana wilayah Kota Palangka Raya dibagi dalam beberapa zoning kawasan yang menunjukkan fungsi pemanfaatan ruang antara lain :

1. Kawasan Bandara
2. Kawasan Cagar Budaya dan Suaka Alam
3. Kawasan Industri
4. Kawasan Pariwisata
5. Kawasan Pengembangan Eko Wisata
6. Kawasan Perdagangan dan Jasa
7. Kawasan Perkantoran
8. Kawasan Perlindungan Setempat
9. Kawasan Perumahan Kepadatan Rendah
10. Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang
11. Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi
12. Kawasan Peruntukan Lainnya
13. Kawasan RTH/Hutan Kota



Gambar 7.2 Kawasan Perumahan



Gambar 7.3 Kawasan Perumahan



Gambar 7.4 RTH



Gambar 7.5 Perkantoran

Sedangkan arahan tentang pengaturan bangunan meliputi pengaturan kepadatan bangunan dan luas terbangun. Di mana yang dimaksud dengan pengaturan kepadatan bangunan merupakan rumusan kebijakan perbandingan luas lahan yang dimanfaatkan bagi bangunan dengan luas wilayah perencanaan.

Tingkat kepadatan bangunan dirinci menjadi :

1. Kawasan bangunan berkepadatan tinggi, mempunyai rata-rata kepadatan bangunan sebanyak 40 bangunan setiap hektar.
2. Kawasan bangunan berkepadatan sedang, mempunyai rata-rata bangunan sebanyak 24 bangunan setiap hektar.
3. Kawasan bangunan berkepadatan rendah, mempunyai rata-rata kepadatan bangunan sebanyak 11 bangunan setiap hektar.

Sedangkan untuk pengaturan luas kawasan terbangun untuk setiap petaknya ditetapkan berkisar antara 30 % - 70 %. Selain itu Rencana Detail Tata Ruang Kota Palangka Raya, juga mengatur tentang arahan Garis Sempadan Jalan terhadap Bangunan dan Pagar, yaitu jarak garis sempadan as jalan terhadap bangunan, di mana besarnya disesuaikan dengan fungsi jaringan jalan dimaksud. Pengaturan lainnya yang terdapat dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota, mencakup pula pada aspek rencana ketinggian bangunan.



Tabel 7.7 Permasalahan, Strategi dan Indikator Penataan Permukiman Formal

Permasalahan	Strategi Pemecahan	Indikator Penataan
<input type="checkbox"/> Kepadatan bangunan/perumahan yang terlalu tinggi. <input type="checkbox"/> Lenyapnya taman-taman dan ruang terbuka. <input type="checkbox"/> Tidak mencukupinya jaringan air bersih, listrik dan pembuangan air kotor. <input type="checkbox"/> Berkurangnya tingkat pelayanan dan fasilitas umum seperti sekolah, tempat pertemuan dan olah raga, rekreasi, dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Hilangnya ciri-ciri khas atau karakter spesifik dari daerah permukiman tertentu.	<input type="checkbox"/> Penataan tata bangunan dan lingkungan. <input type="checkbox"/> Penambahan jaringan baru dan peningkatan pelayanan fasilitas.	<input type="checkbox"/> Intensitas bangunan (KDB, KLB, GSB dan KDH) yang tertata. <input type="checkbox"/> Lingkungan/aspek arsitektural kawasan berdasarkan karakteristik lingkungan perumahan. <input type="checkbox"/> Jaringan utilitas pendukung terpenuhi. <input type="checkbox"/> Skala pelayanan fasilitas yang merata keseluruh kawasan permukiman.

Sumber : Dokumen RP3KP

Pengembangan Kasiba/Lisiba diselaraskan dengan rencana penambahan jumlah penduduk, sehingga kebutuhan akan permukiman juga dapat diketahui. Dengan mengetahui jumlah rumah untuk pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, maka dapat ditentukan pengembangan Kasiba/Lisiba di wilayah perencanaan.

Untuk mewujudkan struktur pola ruang Kasiba dan Lisiba, disamping melalui pentahapan program yang dikembangkan pengelola dan sejalan dengan program pembangunan daerah, tetap diperlukan dukungan pemerintah di dalam menyediakan prasarana dan sarana dasar kawasan yang bersifat strategis sebagai kegiatan stimulan dan pendampingan, yang untuk selanjutnya diharapkan dapat lebih diwujudkan berdasarkan prinsip kemitraan yang positif dari dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah.

Prinsip-prinsip pembangunan kawasan permukiman yang berkelanjutan, baik secara internal di dalam kawasan maupun secara eksternal kesalingterkaitannya dengan skala kawasan yang lebih luas, diterapkan secara efektif di dalam pengembangan Kasiba dan Lisiba, termasuk Lisiba berdiri sendiri. Penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba dengan manajemen kawasan yang efektif diharapkan juga mampu berfungsi sebagai instrumen



untuk mengendalikan tumbuhnya lingkungan perumahan dan permukiman yang tidak teratur dan cenderung kumuh. Keragaman fungsi secara relatif terbatas dari Kasiba dan Lisiba, disamping dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, juga diharapkan dapat menampung secara seimbang kebutuhan perumahan dan permukiman bagi semua lapisan masyarakat, termasuk lapisan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Sehingga dengan demikian mereka dapat terbantu untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk menikmati hunian yang layak, prasarana dan sarana dasar permukiman yang memadai dengan harga yang relatif lebih terjangkau, termasuk melalui pengembangan sistem subsidi silang bila diperlukan. Dalam pengembangan Kasiba dan Lisiba serta kaitannya dengan pengelolaan tata guna tanah, juga perlu dipertimbangkan pengembangan Bank Tanah untuk lebih mengendalikan harga tanah.

Tabel 7.8 Strategi Dan Indikator Penataan Kasiba dan Lisiba

Permasalahan	Strategi Pengembangan	Indikator
<input type="checkbox"/> Belum terbentuknya Badan Pengelola, yang akan menangani kawasan tersebut secara independen.	<input type="checkbox"/> Pengembangan Kasiba/Lisiba <input type="checkbox"/> Menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau, sekaligus merupakan strategi pembangunan permukiman di kawasan perkotaan sebagai upaya preventif tumbuhnya permukiman kumuh.	<input type="checkbox"/> Akan terwujud pengembangan Kasiba/Lisiba dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tersebut. <input type="checkbox"/> Terdapat lahan siap bangun. <input type="checkbox"/> Terdapat prasarana penunjang menuju lokasi.

Sumber : Dokumen RP3KP

Kebutuhan dan pasokan serta harga yang tidak terjangkau oleh MBR itu menjadi salah satu faktor yang mendorong sebagian masyarakat mengisi lahan-lahan kosong yang bukan milik mereka dan tidak sesuai dengan peruntukannya untuk membangun rumah.

Pembiaran itu menyebabkan kekumuhan kota meningkat, perkembangan kota ke daerah pinggiran menjadi tidak terkendali, dan penyediaan infrastruktur menjadi tidak efisien. Pembangunan perumahan yang tidak terpadu dan terintegrasi dengan infrastruktur kota



juga menimbulkan permasalahan seperti pelayanan infrastruktur tidak optimal, banjir, kemacetan, sanitasi buruk, dan harga tanah yang tak terkendali.

7.2.3 Sasaran Program Sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan

Strategi atau pendekatan pembangunan perumahan yang mampu mengurangi berbagai permasalahan tersebut. Salah satu pendekatan yang dilakukan Kementerian Perumahan Rakyat, seperti tercantum dalam UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, adalah pengembangan permukiman berbasis kawasan. Pendekatan kawasan ini dibagi dua, yakni pengembangan permukiman skala besar melalui pola pembangunan kasiba (kawasan siap bangun) dan pengembangan permukiman berdasarkan pola Lisiba BS (lingkungan siap bangun berdiri sendiri). Kasiba menurut undang-undang adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar. Kasiba ini kemudian terbagi dalam satu atau lebih lingkungan siap bangun (Lisiba) yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Secara teknis Kasiba dan Lisiba akan menampung rumah dalam jumlah yang besar. Kasiba mampu memuat sekitar 3.000 -10.000 unit, Lisiba berkisar 1.000 -3.000 unit dan Lisiba BS 1.000 - 2.000 unit.

Kasiba harus dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tingkat II, dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana lingkungan. Dengan demikian, tujuan penyelenggaraan Kasiba untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah dalam lingkungan hidup yang baik dan terjangkau serta menciptakan perkembangan kota yang lebih terarah bisa dicapai. Dengan Kasiba, pengendalian harga tanah lebih dapat dilakukan karena adanya penguasaan tanah secara terencana dalam luasan yang besar, baik oleh badan pengelola maupun atas kerja sama berbagai pihak dengan badan pengelola. Juga dukungan bantuan sebagian infrastruktur dari program pemerintah, penerapan lingkungan hunian berimbang dan subsidi silang menjadi lebih dimungkinkan karena skala yang besar.



Tabel 7.9 Matriks Sasaran Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

No	Uraian Sasaran Program	Sasaran Penanganan	Sasaran Program (Tahun)				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Penyusunan RTBL	5 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan
2	Penyusunan RISP	2 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	-	-
3	Penyusunan Rencana Tindak RTH	1 Laporan	-	1 Laporan	-	-	-
4	Pengembangan Sarana dan Prasarana Revitalisasi Kawasan	3 Kawasan	-	-	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan
5	Pengembangan Sarana dan Prasarana RTH	1 Kawasan	-	-	1 Kawasan	-	-
6	Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Proteksi Kebakaran	2 Kawasan	-	-	1 Kawasan	1 Kawasan	-

Sumber : Hasil Analisa, 2018

7.2.4 Usulan Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

Usulan dan Prioritas Program Penataan Bangunan Dan Lingkungan Kota Palangkaraya tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.10 Usulan dan Prioritas Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

No	Usulan Kegiatan	Lokasi	Tahun	Volume	Satuan	Biaya (Rp 000.000)
1	Penyusunan RTBL Kawasan Perkotaan Bukit Batu	Kecamatan Bukit Batu	2019	1	Laporan	800
2	Penyusunan RTBL Kawasan Perkotaan Jekan Raya	Kecamatan Jekan Raya	2020	1	Laporan	800
3	Penyusunan RTBL Kawasan Perkotaan Pahandut	Kecamatan Pahandut	2021	1	Laporan	800
4	Penyusunan RTBL Kawasan Rakumpit	Kecamatan Rakumpit	2022	1	Laporan	800
5	Penyusunan RTBL Kawasan Perkotaan Sebangau	Kecamatan Sebangau	2011	1	Laporan	800
5	Penyusunan RISP	Kawasan KAHAYAN Riverside	2018	1	Laporan	500
6	Penyusunan RISP	Kota Palangkaraya	2019	1	Laporan	700
7	Penyusunan Rencana Tindak RTH	Kota Palangkaraya	2018	1	Laporan	800
8	Pengembangan PSD Kawasan	Kota Palangka Raya	2019	1	Kawasan	1.500

Sumber : Hasil Analisa, 2018



7.3 SEKTOR PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)

7.3.1 Arahan Kebijakan dan Lingkup Kegiatan SPAM

Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum. Penyelenggara pengembangan SPAM adalah badan usaha milik negara (BUMN)/badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum. Penyelenggaraan SPAM dapat melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan SPAM berupa pemeliharaan, perlindungan sumber air baku, penerimaan sambungan liar, dan sosialisasi dalam penyelenggaraan SPAM.

Beberapa peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) antara lain:

- 1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
- 2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025;
- 3) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

7.3.2 Kondisi Eksisting

PDAM Kota Palangka Raya sebagai Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor 1 Tahun 1986, namun sebelumnya Kota Palangka Raya sudah mempunyai sistem pelayanan air minum sejak tahun enam puluhan dengan kapasitas yang sangat terbatas yaitu 15 L/dt yang dikelola oleh SAM (Saluran Air Minum) di bawah Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.



Penyediaan kebutuhan sarana air bersih di Kota Palangka Raya terbatas hanya pada daerah perkotaan terutama pada pusat kota (Kelurahan Pahandut, Langkai, dan Kelurahan Palangka). Pelayanan sarana air bersih untuk masa mendatang diharapkan akan lebih luas lagi cakupannya, sehingga lebih banyak penduduk yang dapat menikmati pelayanan air bersih. Pelayanan sarana air bersih di Kota Palangka Raya dilaksanakan oleh badan usaha daerah yaitu PDAM. Untuk memperlihatkan gambaran jumlah pelanggan dan pemakaian air bersih yang dilayani oleh PDAM Kota Palangka Raya dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 7.11 Jumlah Pelanggan dan Pemakaian Air Di Kota Palangka Raya
Tahun 2008-2012**

No	Tahun	Jumlah Pelanggan	Pemakaian Air (m3)
1	2012	17.056	4.942.426
2	2011	17.087	3.760.268
3	2010	16.347	5.156.660
4	2009	16.086	3.842.262
5	2008	15.437	3.603.002

Sumber : BPS Kota Palangka Raya

PDAM sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai operator pelayanan air minum. Ada tiga persyaratan standar yang menjadi kewajiban PDAM dalam mencapai objektif dimaksud, yaitu :

- Pertama : Terpenuhinya syarat-syarat kualitas agar dapat dipergunakan secara aman tanpa kawatir terinfeksi sesuatu penyakit terutama penyakit yang dapat menular dan berkembang melalui air seperti diare, thypus, colera dan lain sebagainya.
- Kedua : Harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan tersedia setiap waktu atau pengaliran berlangsung selama 24 jam/hari.

Kedua syarat yang telah disebutkan ini adalah tentang apa yang disebut K3, yaitu : Kualitas, Kuantitas, dan Kontinuitas.

- Ketiga : Sistem dan manajemennya harus profesional dan efisien, sehingga air menjadi murah dan terjangkau oleh kemampuan masyarakat (*affordable*).



Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan air minum di perkotaan umumnya dan di Kota Palangka Raya khususnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Aspek Teknis.

Dari seluruh sistem yang ada saat ini, jumlah kapasitas terpasang adalah sebesar 272,5 liter/detik, dengan kapasitas operasi sebesar 140 l/detik. Sehingga dengan kondisi tersebut saat ini idle capacity adalah sebesar 132,5 l/detik, hal itu terjadi karena jumlah pelanggan baru mencapai 17.056 (data 2012). Dengan menggunakan data kependudukan sampai dengan tahun 2015, maka cakupan pelayanannya baru mencapai 58,7 % dari total jumlah penduduk.

Saat ini pasokan air baku Perusahaan Daerah Air Minum Palangka Raya yang berasal dari intake sungai Kahayan, semakin tahun dirasakan semakin menurun kualitasnya, antara lain tingkat kekeruhan yang semakin tinggi. Tingginya tingkat kekeruhan sumber bahan baku dari Sungai Kahayan, terutama di musim hujan disebabkan lokasi intake sumber bahan baku berada dekat dengan pertemuan antara sungai Kahayan dan Sungai Rungan dan Manuhing. Di mana aliran air dari sungai Rungan berwarna merah bercampur dengan air sungai Kahayan yang berwarna kecoklatan. Tingginya tingkat kekeruhan tersebut menyebabkan biaya operasional penjernihan akan meningkat.

Permasalahan lainnya saat ini tingkat kebocoran air yang didistribusikan oleh PDAM cukup tinggi, yaitu sekitar 30,68 % pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 sebesar 28.90 %. Data tersebut menunjukkan dari aspek prosentase menurun, namun dari sisi jumlah meningkat dari sebelumnya tahun 2006 sebesar 1.104.704 m³/tahun menjadi 1.210.189 m³/tahun. Tingginya tingkat kebocoran tersebut terjadi karena oleh jaringan air minum kurang dikelola dengan baik, minimnya dana pemeliharaan dan perawatan terhadap pipa jaringan akibat tarif yang terlalu rendah, selain itu disebabkan adanya penyebab non teknis.

Dari aspek peralatan, sampai saat ini PDAM hanya memiliki 1 unit pompa intake, sehingga secara terus menerus dioperasikan. Peralatan lainnya yang sudah dalam kondisi tua meliputi mixer pengaduk bahan kimia, pompa dozing yang tidak layak pakai dan peralatan pengangkat bahan kimia.



2. Aspek Keuangan

Bahwa tarif yang telah diberlakukan selama ini adalah sebesar Rp. 1.500/m³ yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Palangka Raya No. 154 Tahun 2007 tanggal 12 Mei 2007 dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2007. Sedangkan tarif rata-rata adalah sebesar Rp. 2.835/m³ struktur tarif yang telah ditetapkan tersebut baru mencapai 85 % dibandingkan dengan biaya produksi sebesar Rp. 3.310/m³.

Kendala dalam rangka peningkatan kenaikan tarif adalah pada pertimbangan kemampuan masyarakat dengan batasan 4 % dari rata-rata pendapatan perkapita. Saat ini pengolahan dan distribusi air bersih di Kota Palangka Raya sepenuhnya dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum, dan peran pemerintah Kota sebatas memberikan pembinaan dan dukungan pembiayaan, namun alokasi yang mampu disediakan setiap tahunnya hanya bersifat insidental dan dukungan subsidi tarif. Namun Pemerintah Kota telah menerbitkan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya kepada PDAM Kota Palangka Raya sebesar Rp. 5.500.000.000,- yang akan digunakan untuk perbaikan instalasi Air Minum pada tahun 2009 dan 2010.

Permasalahan lainnya yang terjadi pada PDAM Kota Palangka Raya, menyangkut masalah posisi modal yang masih negatif dan keterbatasan kemampuan pendanaan untuk menggantikan aktiva yang masih rendah, dan itu terlihat dari masih terjadinya akumulasi kerugian.

3. Aspek Kelembagaan

Harus diakui bahwa saat ini dari aspek kelembagaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Palangka Raya, masih belum mampu menjadi perusahaan yang mandiri, dan itu dapat dimaklumi karena PDAM adalah perusahaan milik daerah. Namun Pemerintah Kota sebagai pemilik, dari aspek pendanaan masih belum maksimal memberikan dukungan.

Tabel 7.12 Potensi dan Masalah Air Bersih Kota Palangka Raya

NO	Jenis	Potensi	Masalah
1	Air Bersih	<ul style="list-style-type: none">Rencana pengembangan sumber air bakuPengembangan sumber daya air baku kota Palangka Raya agar dapat menjangkau	<ul style="list-style-type: none">Pelayanan jaringan air bersih yang disediakan PDAM di wilayah Kota Palangka Raya baru menjangkau sebagian kecil kebutuhan penduduk.



NO	Jenis	Potensi	Masalah
		seluruh wilayah Kota Palangka Raya. Pola pengembangan air bersih direncanakan dengan sistim jaringan pipa, terutama untuk penggunaan/ perbaikan jaringan pipa yang sudah ada dan pengadaan jaringan baru.	Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, sebagian besar penduduk masih memanfaatkan sumur galian, pompa dan sungai.

Sumber : Hasil Analisa, 2018

7.3.3 Sasaran Program Sektor SPAM

Permasalahan utama air bersih adalah faktor ketidakmerataan dan permasalahan daerah tangkapan. Dari permasalahan tersebut, perlu diarahkan untuk pengembangan kedepan adalah pemerataan pelayanan sistem distribusi air bersih dengan beberapa strategi pengembangan akan dispesifik kan kedalam tiga aspek yaitu aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Ketiga aspek tersebut diharapkan akan menghasilkan dampak positif, dalam hal ini dapat berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perencanaan kota akan selalu berkaitan dengan pengembangan dan penyediaan prasarana air bersih bagi penduduknya. Kegiatan perencanaan kota secara fisik akan mempengaruhi penyediaan dan pengembangan prasarana air bersih melalui dua cara:

1. Perencanaan kota akan mempengaruhi pola pengembangan struktur tata ruang kota, kondisi tersebut perlu memperhatikan penyediaan air bersih.
2. Jika yang pertama telah dilaksanakan, maka pembangunan prasarana air bersih akan mempengaruhi perencanaan dan akan sekaligus memperkuat pola pengembangan tata ruang kota berikutnya



Gambar 7.6 Bagan Alir Keterkaitan Perencanaan Kota Dengan penyediaan Air Bersih

Dengan pengertian di atas, maka proses pelaksanaan perencanaan air bersih harus memperhatikan rencana kota dengan alasan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan kota akan meningkatkan kebutuhan air bersih.
2. Dengan dapat diketahui kebutuhan peningkatan air bersih, maka ke depan dapat diantisipasi penyediaannya.
3. Dengan dapat diketahui pola pemekaran wilayah, maka dapat segera ditentukan daerah pelayanan penyediaan air bersih.

Terkait dengan pengembangan penyediaan air bersih, maka dalam perencanaannya dirumuskan beberapa strategi dalam setiap aspek dan dikembangkan dalam program-program strategis.

Tabel 7.13 Strategi Pengembangan Air Bersih

Wilayah	Aspek	Strategi	Program Strategis	Pelaku	Sumber Dana
Semua Kawasan	Fisik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan pelayanan publik. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pengembangan kinerja pengelolaan air bersih. 	PU, PDAM	APBN/APBD
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemanfaatan air bersih bagi kepentingan sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pengembangan pengelolaan jaringan air bersih. 		



PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA

Wilayah	Aspek	Strategi	Program Strategis	Pelaku	Sumber Dana
	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> Membangun partisipasi masyarakat dalam pembangunan sektor air bersih. 	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk jaringan komunikasi antar <i>stakeholder</i> dalam pembangunan industri air bersih. Melakukan analisis tentang konsumsi air bersih secara periodik. 	PU, PDAM	APBN/APBD
		<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan kelembagaan ekonomi sektor air bersih yang efisien dan berkelanjutan. 	<ul style="list-style-type: none"> Merumuskan hubungan kelembagaan yang kondusif bagi pengembangan industri air bersih. Pengelolaan terpadu, <i>sharing</i>, atau merger. Memperkuat kemandirian dan otoritas PDAM. Perumusan standar evaluasi kinerja PDAM yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan evaluasi kinerja. 		
		<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan kelembagaan hukum sektor air bersih. 	Membangun mekanisme insentif <i>reward</i> dan <i>punishment</i> .		
		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pendapatan PDAM. 	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan harga yang optimal. Peningkatan industri (harga) air. Penetapan harga (<i>price discrimination</i>) di antara dan dalam kelompok konsumen. 		
		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan efisiensi dan keuntungan PDAM. 	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan dan pemeliharaan sistem distribusi. Pendidikan dan ketrampilan SDM (<i>human capital</i>) industri air bersih. Perbaikan manajemen dan mutu pelayanan. 		
Semua Kawasan	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Mempertahankan <i>share</i> sektor air bersih. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pertumbuhan permintaan air bersih. Peningkatan investasi. 	PU, PDAM	APBN/APBD
		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan aktifitas ekonomi wilayah yang terkait dengan sektor air bersih. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan aktifitas ekonomi kedepan. Pembangunan infrastruktur. Pembangunan di bidang hukum dan pertanahan. 		



Wilayah	Aspek	Strategi	Program Strategis	Pelaku	Sumber Dana
Semua Kawasan	Fisik	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sumber- sumber air baku. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan ekonomi industri manufaktur/jasa. Investasi pengembangan sumber air baku. Eksplorasi air baku. 	PDAM	APBN/APBD
		<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan kualitas air baku. 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi kualitas air baku dan air bersih. Sistem monitoring dini kualitas air. Penerapan teknologi pengolahan air baku. 		
Semua kawasan	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan sumber daya air. 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis potensi dan panen sumberdaya air. Konservasi sumber daya hutan, tanah dan air. Penerapan baku mutu lingkungan. 	PU, PDAM	APBN, APBD
		<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian alokasi air baku. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan dan penyuluhan lingkungan. Memperkuat mekanisme pengawasan dan penerapan hukum. 		

Sumber : Hasil Analisa, 2018

Tabel 7.14 Matriks Sasaran Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

No	Uraian Sasaran Program	Kondisi Eksisting	Sasaran Program (Tahun)				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Sistem Perpipaan Cakupan Pelayanan Penduduk (%)	21 %	31%	41%	61%	81%	100%
2	Sistem Bukan Perpipaan Cakupan Pelayanan Penduduk (%)	79 %	79 %	79 %	79 %	79 %	79 %

Sumber : Hasil Analisa, 2018

7.3.4 Usulan Program dan Kegiatan Pengembangan SPAM

Usulan dan prioritas program komponen Pengembangan SPAM disusun Berdasarkan paket-paket fungsional dan sesuai kebijakan prioritas program seperti pada RPJM.

Penyusunan tersebut memperhatikan kebutuhan air minum berkaitan dengan pengembangan atau pembangunan sektor dan kawasan unggulan. Dengan demikian usulan sudah mencakup pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pembangunan ekonomi.



Usulan program yang diajukan perlu dievaluasi kesesuaiannya dengan hasil analisis dan identifikasi yang telah dilakukan. Selain itu, perlu juga dicek keterpaduan dengan sektor-sektor lainnya. Usulan program harus dapat mencerminkan besaran dan prioritas program, dan manfaatnya ditinjau dari segi fungsi, kondisi fisik, dan non-fisikantar kegiatan dan pendanaannya. Penjabaran program-program tersebut disesuaikan dengan struktur tatanan program RPJM yang diwujudkan dalam paket-paket kegiatan/program. Usulan kebutuhan program sektor pengembangan SPAM dapat dilihat Rencana Program Air Minum pada tabel berikut

Tabel 7.15 Usulan dan Prioritas Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

No	Usulan Kegiatan	Lokasi	Tahun	Volume	Satuan	Biaya (Rp 000.000)
1	SPAM Regional Penyusunan FS SPAM Regional	Kota Palangka Raya	2019	1	Laporan	100
	Penyusunan DED SPAM Regional	Kota Palangka Ray	2020	1	Laporan	400
	Pembangunan SPAM Regional	Kota Palangka Raya	2019	1	Kota	100
2	SPAM Perkotaan					
3	Pembangunan sarana air bersih	Kecamatan Bukit Batu	2019	1	Kawasan	650
4	Pembangunan sarana air bersih	Kecamatan Jekan Raya	2020	1	Kawasan	650
5	Pembangunan sarana air bersih	Kecamatan Pahandut	2020	1	Kawasan	650
6	Pembangunan sarana air bersih	Kecamatan Rakumpit	2021	1	Kawasan	650
7	Pembangunan sarana air bersih	Kecamatan Sebangau	2022	1	Kawasan	650
8	Optimalisasi sarana air minum di IKK	Kecamatan Bukit Batu	2019	20	Liter/detik	1.500
9	Optimalisasi sarana air minum di IKK	Kecamatan Jekan Raya	2020	20	Liter/detik	1.500
10	Optimalisasi sarana air minum di IKK	Kecamatan Pahandut	2020	20	Liter/detik	1.500
11	Optimalisasi sarana air minum di IKK	Kecamatan Rakumpit	2021	20	Liter/detik	1.500
12	Optimalisasi sarana air minum di IKK	Kecamatan Sebangau	2022	20	Liter/detik	1.500

Sumber : Hasil Analisa, 2018



PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
 BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA

Tabel 7.16 Program SPAM

WILAYAH	ASPEK	STRATEGI	PROGRAM STRATEGIS	PELAKU	JANGKA WAKTU 20 TAHUN (2013-2033)				SUMBER DANA
					2013 s/d 2018	2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	
Seluruh kawasan prioritas	Kebijakan	Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan	Program pengembangan perumahan	Dinas PU Cipta Karya	X	X			APBD
			Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu		X	X			
			Pengembangan penataan lingkungan permukiman, pemantapan standar pelayanan minimal lingkungan permukiman		X	X	X		
			Memperjelas status lahan	Dinas PU Cipta Karya/BPN	X			X	
			Menertibkan status penguasaan lahan yang menjadi aset pemerintah	BPN/ BPKAD					
			Memberikan fasilitasi untuk mendapatkan tempat tinggal layak huni		X				APBD
Mendawai	Fisik	Penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman	Pengembangan kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba)	Dinas PU Cipta Karya	X	X	X		
			Penyediaan tanah siap bangun dan kapling tanah matang, serta penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman		X	X			
			Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat						
Mendawai, Menteng baru, Mahir Mahar, Kereng Bengkirai, Bukit Tunggal	Fisik	Mewujudkan pembangunan dan pengembangan permukiman yang layak huni dan berkeadilan	Peningkatan kualitas prasarana dan sarana infrastruktur penunjang permukiman		X	X	X	X	APBD, APBD Prov, APBN
			Menertibkan status penguasaan lahan yang menjadi aset pemerintah		X	X	X		



PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
 BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA

WILAYAH	ASPEK	STRATEGI	PROGRAM STRATEGIS	PELAKU	JANGKA WAKTU 20 TAHUN (2013-2033)				SUMBER DANA
					2013 s/d 2018	2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	
			<ul style="list-style-type: none"> Pembatasan dan mengendalikan perkembangan permukiman yang berada di sempadan sungai 		X	X	X		
			Memberikan fasilitasi untuk mendapatkan tempat tinggal layak huni						
Mendawai, Menteng baru, Mahir Mahar, Kereng Bengkirai, Bukit Tunggal	Kebijakan	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan	<ul style="list-style-type: none"> Revitalisasi kawasan permukiman kumuh 	Dinas PU Cipta Karya	X				APBD
					X				
			<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 		X	X			
			<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan 						
Mendawai, Menteng baru, Mahir Mahar, Kereng Bengkirai, Bukit Tunggal	Fisik	Mewujudkan pembangunan dan pengembangan permukiman yang layak huni dan berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan prasarana dan sarana penunjang atau infrastruktur 	Dinas PU Cipta Karya/Binamarga	X	X	X	X	APBD
			<ul style="list-style-type: none"> Menertibkan status penguasaan lahan yang menjadi aset pemerintah 						
			<ul style="list-style-type: none"> Pembatasan dan mengendalikan perkembangan permukiman yang berada di sempadan sungai 		X	X	X		
			Memberikan fasilitasi untuk mendapatkan tempat tinggal layak huni		X	X	X		
Mendawai, Menteng baru, Mahir Mahar, Kereng Bengkirai, Bukit Tunggal	Sosial	Peningkatan pelayanan publik seperti IMB serta pelayanan terhadap kepemilikan rumah	<ul style="list-style-type: none"> Program Pemberdayaan komunitas Perumahan 	PU, BAPPEDA Masyarakat/ Swasta	X	X			
			<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi pemberian kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan perumahan 			X	X		APBD, APBD Prov



PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
 BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA

WILAYAH	ASPEK	STRATEGI	PROGRAM STRATEGIS	PELAKU	JANGKA WAKTU 20 TAHUN (2013-2033)				SUMBER DANA
					2013 s/d 2018	2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	
Seluruh kawasan prioritas	Kebijakan		▪ Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran		X	X			APBD
			▪ Monitoring dan evaluasi		X				
		Mewujudkan pembangunan dan pengembangan prasarana sanitasi dan penanganan kebersihan	▪ Menyiapkan dukungan infrastruktur permukiman		X	X			
			▪ Mengembangkan permukiman layak huni dengan sistem sanitasi terpadu		X	X			
			▪ Program pengembangan perumahan	Dinas PU Cipta Karya		X	X		
			▪ Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu						
Mendawai, Menteng baru, Mahir Mahar, Kereng Bengkirai, Bukit Tunggal	Fisik	Penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman	▪ Pengembangan penataan lingkungan permukiman, pemantapan standar pelayanan minimal lingkungan permukiman				X		APBD
			▪ Memperjelas status lahan	Dinas PU Cipta Karya/BPN	X	X	X		
			▪ Menertibkan status penguasaan lahan yang menjadi aset pemerintah	BPN/ BPKAD		X	X		
			▪ Memberikan fasilitasi untuk mendapatkan tempat tinggal layak huni						
			▪ Pengembangan kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba)	Dinas PU Cipta Karya	X	X	X	X	
			▪ Penyediaan tanah siap bangun dan kapling tanah matang, serta penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman		X	X	X		



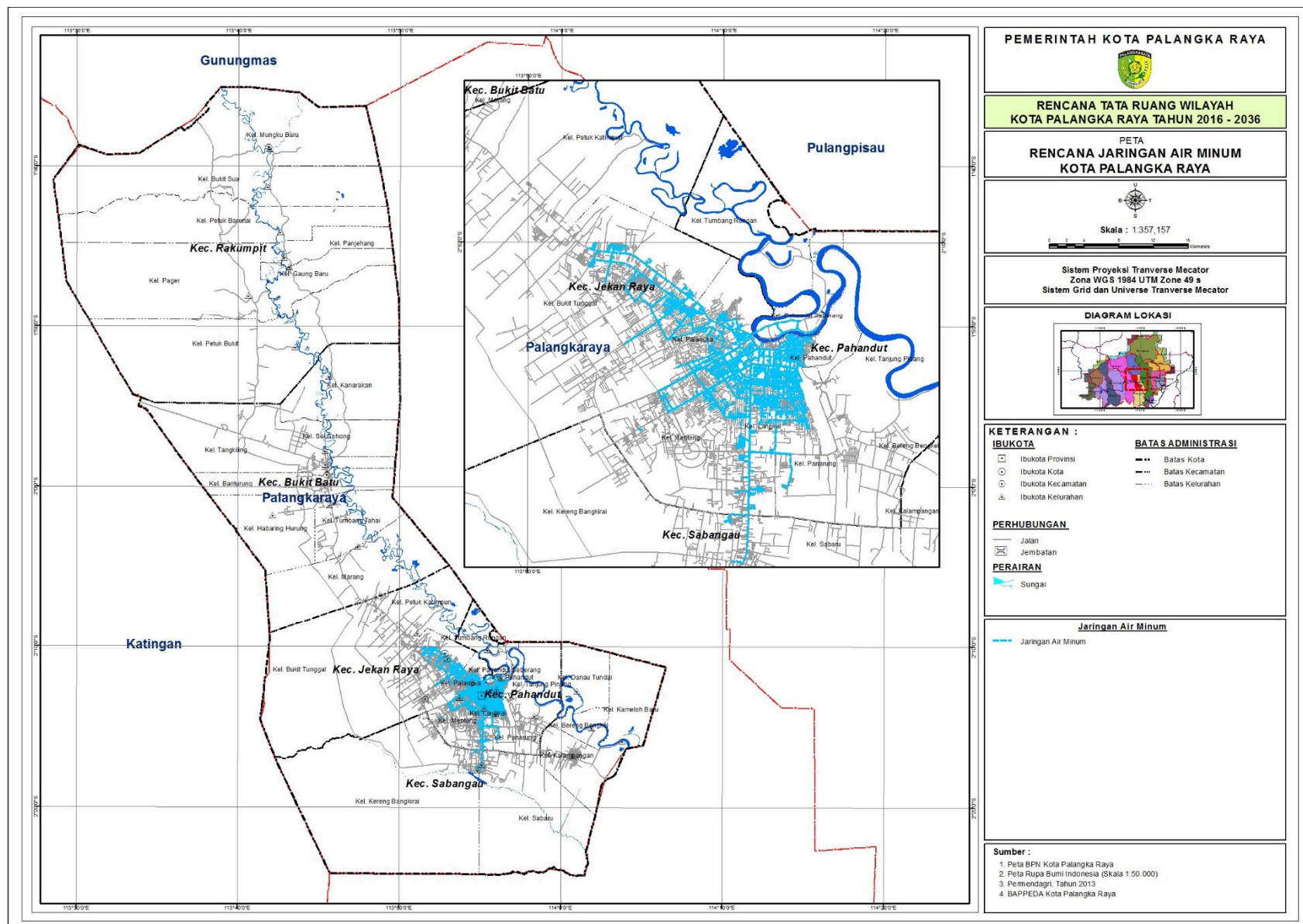
PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
 BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA

WILAYAH	ASPEK	STRATEGI	PROGRAM STRATEGIS	PELAKU	JANGKA WAKTU 20 TAHUN (2013-2033)				SUMBER DANA
					2013 s/d 2018	2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	
			<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 		X	X	X		
Mendawai, Menteng baru, Mahir Mahar, Kereng Bengkirai, Bukit Tunggal	Fisik	Mewujudkan pembangunan dan pengembangan permukiman yang layak huni dan berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas prasarana dan sarana infrastruktur penunjang permukiman 		X	X	X	X	APBD
			<ul style="list-style-type: none"> Menertibkan status penguasaan lahan yang menjadi aset pemerintah 		X	X	X	X	
			<ul style="list-style-type: none"> Pembatasan dan mengendalikan perkembangan permukiman yang berada di sempadan sungai 		X	X	X	X	

Sumber : Hasil Analisa, 2018



PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
 BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA



Gambar 7.7 Rencana Jaringan Air Bersih Kota Palangka Raya (RTRW Kota Palangka Raya)



7.4 SEKTOR PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN (PLP)

7.4.1 Air Limbah

A. Arahan Kebijakan

Beberapa peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan air limbah, antara lain:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
3. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 02/MENKLH/I/1998 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan

B. Kondisi Eksisting

Pembangunan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan di perkotaan dan perdesaan Kota Palangka Raya belum begitu mendapatkan perhatian dan prioritas. Penanganan masalah limbah masih terbatas pada tahap konsep penanganan dan belum diwujudkan ke dalam pembangunan fisik. Selain itu, pengelolaan limbah manusia secara sistematis belum dilakukan. Penanganan limbah pada tingkat rumah tangga dilayani melalui jamban dengan tangki septik, sedangkan masyarakat yang tidak memiliki jamban menggunakan tempat pembuangan limbah tradisional seperti sungai, saluran drainase kota, dan lain-lain. Dalam upaya penataan permukiman kumuh di perkotaan, pemerintah membangun tempat mandi, cuci, dan kakus (MCK). Sebagian prasarana dan sarana penyehatan lingkungan cakupan pelayanannya terbatas, kurang terpelihara, dan kurang dimanfaatkan oleh masyarakat.

Perkembangan jumlah penduduk berakibat meningkatnya kebutuhan permukiman baru sehingga mendorong adanya penciptaan permukiman-permukiman baru maupun



bertambah padatnya permukiman yang sudah ada. Hal yang tidak bisa dihindari adanya peningkatan jumlah limbah cair yang dihasilkan pada lingkungan permukiman tersebut.

Limbah cair rumah tangga pada permukiman apabila tidak ditangani dengan cukup baik, akan berpengaruh terhadap kualitas lingkungan diantaranya penurunan kualitas air badan air dan air tanah, penurunan tingkat kesuburan tanah, maupun penurunan tingkat estetika suatu wilayah.

Ketika jumlah penduduk masih sedikit, maka daya dukung lingkungan masih mampu melakukan pembersihan sendiri (*self purification*), namun dengan bertambahnya jumlah penduduk dan peningkatan debit limbah cair yang dihasilkan maka diperlukan metode pengelolaan sehingga yang terbuang pada lingkungan diharapkan sudah memenuhi syarat.

Pengolahan air limbah di Kota Palangka Raya sampai dengan dilakukan menggunakan septick tank 1.518 KK dan cubluk berjumlah 17.770 KK. Di mana jumlah rumah tangga tanpa septick tank dan cubluk mencapai jumlah 6.093 KK. Lokasi Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu Kota Palangka Raya terletak di Jl. Cilik Riwut Km 14, dengan kapasitas pengelolaan mencapai jumlah 35 m³/hari dengan prosentase penduduk terlayani 44.426 KK.

Pengelolaan air limbah di Kota Palangka Raya sampai saat ini belum sepenuhnya mampu ditangani dan dibiayai oleh Pemerintah Kota, terutama dalam hal pembangunan sarana dan prasarannya. Penanganan air limbah selama ini diusahakan oleh masyarakat secara swadaya untuk membuat septicktank yang sederhana dan lainnya berupa cubluk. Akan tetapi dari jumlah penduduk Kota Palangka Raya tidak semuanya memiliki septicktank dan cubluk, mereka membuang air limbah langsung kedalam badan air Sungai Kahayan, sungai Rungan-Manuhing dan Sungai Sabangau.

Adapun permasalahan yang muncul dalam pengelolaan air limbah dapat diuraikan sebagai berikut ini :



1. Sistem pengelolaan air limbah secara terpadu dan terpusat di wilayah Kota Palangka Raya masih belum ada, hal itu terjadi karena keterbatasan anggaran pemerintah Kota serta belum menjadi skala prioritas.
2. Penggunaan kawasan sungai sebagai tempat pembuangan tinja masih tinggi terutama yang tinggal dibantaran sungai.
3. Secara umum persentase masyarakat Kota Palangka Raya yang mempunyai akses terhadap jamban keluarga, jamban umum atau jamban bersama dilengkapi dengan bangunan pengolah seperti cubluk dan tangki septic masih belum berkembang, kalupun tersedia hanya terbatas di kawasan pusat perdagangan.
4. Pola pendanaan investasi di bidang pembiayaan prasarana dan sarana air limbah selama ini sangat bertumpu kepada kemampuan pemerintah. Kedepan peran Pemerintah baik pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran akan sangat terbatas, untuk itu upaya pelibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaannya harus lebih ditingkatkan.
5. Sampai saat ini produk hukum yang berkaitan dengan pengembangan kerangka peraturan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemilikan, dan fasilitas pengelolaan air limbah.

Untuk memulai keterlibatan Pemerintah dalam penanganan air limbah di Kota Palangka Raya hanya terbatas pada tempat-tempat umum seperti penyediaan WC umum. Pada beberapa tempat telah dibangun MCK Plus, akan tetapi tempatnya tidak melalui studi dan sosialisasi yang baik sehingga pembangunan air limbah tersebut tidak berjalan optimal. Oleh karena itu diperlukan suatu studi yang dapat memberikan informasi tentang pembangunan pengelolaan limbah secara komunal, seperti pembangunan MCK Plus, memperbaiki IPLT dan pembangunan IPAL. Adapun studi yang dapat dilaksanakan adalah penyusunan masterplan air limbah Kota Palangka Raya. Dari kedua studi tersebut kemudian dilanjutkan dengan pembuatan DED sarana pengelolaan air limbah Kota Palangka Raya. Selain itu diperlukan penambahan mobil tinja memadai, sebagai prasarana pengelolaan air limbah.



C. Sasaran program

Pengembangan air limbah diutamakan untuk air limbah rumah tangga, namun tidak menutup kemungkinan kedepan akan dikembangkan kawasan industry yang juga dapat menimbulkan pencemaran (limbah). Sehingga, berdasarkan permasalahan dan kajian kebijakan maka didapatkan strategi pengembangan untuk mengarahkan program-program pengembangan air bersih dimasa yang akan datang.

Tabel 7.17 Strategi Pengembangan Air Limbah

WILAYAH	ASPEK	STRATEGI	PROGRAM STRATEGIS	PELAKU	SUMBER DANA
Semua Kawasan	Fisik	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kinerja dan pengelolaan. 	PU, Dinas Pasar dan Kebersihan	APBN, APBD Prop, APBD Kota
	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kerjasama dan investasi 	<ul style="list-style-type: none"> Mengelola air limbah secara terintegrasi, sehingga tepat guna (efektif), berdaya guna (efisien) dan terjangkau serta dapat dioperasikan secara berkelanjutan, dengan bertumpu kepada kemitraan antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. 	PU, Dinas Pasar dan Kebersihan	
	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kerjasama dan bantuan. 	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan Pemerintah Pusat diberikan untuk pemantapan kelembagaan melalui pembinaan teknis di bidang manajemen pengolahan air limbah. Bantuan pemerintah untuk pengelolaan air limbah perdesaan dilaksanakan melalui Inpres (saat ini DAU) dan program sektoral. 	PU, Dinas Pasar dan Kebersihan	

Sumber : Hasil Analisa, 2018



D. Usulan Program

Tabel 7.18 Program Air Limbah

WILAYAH	ASPEK	STRATEGI	PROGRAM STRATEGIS	PELAKU	JANGKA WAKTU 20 TAHUN (2013-2033)				SUMBER DANA
					2013 s/d 2018	2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	
Semua Kawasan Priorotas	Fisik	Peningkatan sarana prasarana	▪ Peningkatan dan pengembangan sistem kebersihan	PU Ciptakarya Dinas Pasar dan Kebersihan	X	X	X	X	APBD, APBD Prov
			▪ Optimalisasi pengoperasian TPA dan pembangunan TPS baru		X	X			
			▪ Pembangunan incinerator skala kecil			X	X		
			▪ Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan		X	X	X		
			▪ Monitoring, evaluasi				X		
	Kelembagaan	Pelaksanaan kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat	▪ Peningkatan pemberdayaan masyarakat terkait kebersihan lingkungan	PU Ciptakarya Dinas Pasar dan Kebersihan	X	X	X		APBD, APBD Prov
		Pelaksanaan kerjasama dengan pihak swasta	▪ Pengembangan program 3R (reuse, recycle, reduce)		X	X			
			▪ Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan		X		X		
			Monitoring, evaluasi						
		Sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Pekerjaan Umum	▪ Terciptanya kebijakan Pekerjaan Umum yang komprehensif dan terpadu serta berkontribusi nyata dalam pembangunan kawasan prioritas	PU Ciptakarya Dinas Pasar dan Kebersihan	X	X	X		



PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA

WILAYAH	ASPEK	STRATEGI	PROGRAM STRATEGIS	PELAKU	JANGKA WAKTU 20 TAHUN (2013-2033)				SUMBER DANA
					2013 s/d 2018	2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	
	Pengelolaan sampah lingkungan		▪ Ditetapkannya Perda Pengelolaan Sampah dan peraturan turunannya			X	X		
			▪ Dipisahkannya fungsi operator dan regulator dalam pengelolaan sampah serta Terbentuknya Dewan Pengelolaan Persampahan Perkotaan.			X			
		Pengolahan sampah menjadi barang berguna	▪ Pengembangan inovasi	PU Ciptakarya, Dinas Pasar dan Kebersihan, BLH	X	X			APBD, APBD Prov
			▪ Pelaksanaan pemilahan sampah di dalam kawasan atau tempat penampungan		X	X	X		
			▪ Pengolahan sampah organik dan pembangunan unit-unit daur ulang		X	X	X		
			▪ Pengembangan home composting di masyarakat		X	X			
			▪ Monitoring, evaluasi						
		Pengembangan kinerja pengelolaan sampah	▪ Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	PU Ciptakarya Dinas Pasar dan Kebersihan	X				APBD, APBD Prov
			▪ Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan		X	X	X		
			▪ Monitoring, evaluasi						

Sumber : Hasil Analisa, 2018



7.4.2 Drainase

A. Kondisi Eksisting

Bila dilihat dari konsep awal drainase kota Palangka Raya sejak tahun 1992 yaitu dengan memanfaatkan saluran alam sebagai Pengeringan kota. Kemudian berkembang pemikiran dengan membuat rencana Sistem Drainase Induk Kota palangka Raya diteruskan dengan pengembangan sistem drainase sekundernya. Kemudian dari jaringan saluran yang ada di buat Usulan Kerangka Drainase, dan dari jaringan saluran yang ada dibuat Usulan Kerangka Drainase kota Palangka Raya dengan beberapa alternatif. Adapun hasil Perencanaan Pada Tahun 1992 meliputi alternatif 3 sebagai pilihan yang dianggap baik dan sampai sekarang mengacu pada Desain Perencanaan Alternatif .



Gambar 7.2 Drainase Primer (Sungai)
di Kota Palangkaraya



Gambar 7.1 Drainase Sekunder di
Kota Palangkaraya

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan drainase kota adalah faktor keterenggan wilayah yang relatif datar, sehingga memperlambat proses pengeringan/drained air hujan yang dialirkan. Untuk itu maka penerapan sistim mekanis (pompa air kapasitas 2 - 3 m³/detik) dapat diujai kemungkinannya untuk diterapkan. Luasnya lahan rawa merupakan potensi untuk menjadi reservoir/ penampung dari air hujan melalui saluran drainase.

Rencana pengembangan saluran ini ditujukan untuk pengatusan dan pengaliran air limbah. Pemanfaatan aliran sungai menjadi saluran utama drainase kota, dan akan diterapkan saluran fungsi ganda baik untuk air limbah maupun untuk pengatusan. Kondisi fisik (topografi) yang relatif datar di Kota Palangka Raya, maka kemungkinan penerapan sistim pompa dapat diujai kemungkinannya, baik secara teknis maupun biaya.



Ketersediaan jaringan drainase yang permanen di wilayah Kota Palangka Raya, hanya terdapat di Kota Palangka Raya yaitu berupa saluran pengeringan sebagai saluran drainase utama yang mengelilingi wilayah pusat kota. Untuk daerah di luar pusat kota, masih menggunakan saluran drainase tanah serta ada yang langsung menuju sungai tanpa menggunakan saluran drainase/alami.

Rencana pengembangan jaringan drainase dimasa yang akan datang adalah meningkatkan kondisi fisik jaringan drainase yang ada serta mengembangkan jaringan drainase pada setiap pusat pemukiman yang belum mempunyai jaringan drainase. Pemanfaatan sungai-sungai yang ada sebagai jaringan drainase primer untuk menampung jaringan drainase yang lebih kecil hirarkhinya (sekunder dan tersier).

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan drainase kota adalah faktor kelerengan wilayah yang relatif datar, sehingga memperlambat proses pengeringan/drainage air hujan yang dialirkan. Untuk itu maka penerapan sistim mekanis (pompa air kapasitas 2 - 3 m³/detik) dapat diujicobakan kemungkinannya untuk diterapkan. Luasnya lahan rawa merupakan potensi untuk menjadi reservoir/ penampung dari air hujan melalui saluran drainase.

Rencana pengembangan saluran ini ditujukan untuk pengatusan dan pengaliran air limbah. Pemanfaatan aliran sungai menjadi saluran utama drainase kota, dan akan diterapkan saluran fungsi ganda baik untuk air limbah maupun untuk pengatusan. Kondisi fisik (topografi) yang relatif datar di Kota Palangka Raya, maka kemungkinan penerapan sistim pompa dapat diujicobakan kemungkinannya, baik secara teknis maupun biaya.

Beberapa permasalahan terkait dengan pengembangan sistem drainase Kota Palangka Raya, yang mencakup aspek kelembagaan, teknis operasional, pembangunan saluran, aspek peraturan perundang-undangan dan peran serta masyarakat meliputi antara lain :

1. Kondisi dan lokasi genangan di wilayah Kota Palangka Raya pada umumnya terjadi pada bulan Oktober, Nopember dan Desember meliputi kawasan pusat kota seperti kawasan Temanggung Tilung, Jl. Yos Sudarso, Komplek Amaco, kiri-kanan Jalan G.



Obos, daerah Perumnas Jl. Garuda dan daerah Jl. Rajawali Km.5 dengan tinggi genangan antara 20 – 70 cm. Hal itu terjadi karena sebagian besar kondisi saluran yang ada masih dalam bentuk galian tanah, terutama pada saluran primer.

2. Pada beberapa ruas saluran drainase terjadi luapan pada musim hujan karena kapasitas saluran tidak terpenuhi.
3. Tidak berfungsinya dengan baik beberapa saluran pengeringan (drainase) akibat genangan.
4. Pada beberapa wilayah tidak adanya gorong-gorong untuk saluran sekunder dan adanya saluran sekunder dan tersier tidak terawat, adanya bangunan di atas saluran, dan penutupan saluran untuk akses pertokoan, endapan dan sampah.
5. Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat yang belum maksimal dilibatkan untuk bersama-sama melakukan pemeliharaan atas saluran drainase yang ada.
6. Kendala dan permasalahan lainnya terkait dengan keterbatasan anggaran yang mampu disediakan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mempercepat peningkatan dan pemeliharaan saluran drainase sehingga dapat menurunkan tingkat genangan yang muncul pada saat musim penghujan.

Tabel 7.19 Potensi dan Masalah Drainase Kota Palangka Raya

No	Jenis	Potensi	Masalah
1	Drainase	<ul style="list-style-type: none">• Rencana pengembangan jaringan drainase adalah meningkatkan kondisi fisik jaringan drainase yang ada serta mengembangkan jaringan drainase pada setiap pusat pemukiman yang belum mempunyai jaringan drainase. Pemanfaatan sungai-sungai yang ada sebagai jaringan drainase primer untuk menampung jaringan drainase yang lebih kecil hirarkhinya (sekunder dan tersier).	<ul style="list-style-type: none">• Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan drainase kota adalah factor kelerengan wilayah yang relatif datar, sehingga memperlambat proses pengeringan/drainage air hujan yang dialirkan.

Sumber : Hasil Analisa, 2018

B. Sasaran program

Pengembangan drainase terkait dengan penataan sistem dan saluran. Dalam pengembangan drainase, dilihat pokok-pokok yang menjadi permasalahan sehingga arah kebijakan dan strategi



pengembangan kedepan dapat terarah serta sinkron. Dengan ini perencanaan akan terwujud dengan baik, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.20 Permasalahan, Arah Kebijakan, Dan Strategi Pengembang

Permasalahan	Arah Kebijakan	Strategi Pengembangan
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Faktor kelerengan wilayah yang relatif datar, sehingga memperlambat proses pengeringan/<i>drained</i> air hujan yang dialirkan. <input type="checkbox"/> Sebagian besar kondisi saluran yang ada masih dalam bentuk galian tanah, terutama pada saluran primer. <input type="checkbox"/> Pada beberapa ruas saluran drainase terjadi luapan pada musim hujan karena kapasitas saluran tidak terpenuhi. <input type="checkbox"/> Tidak berfungsinya dengan baik beberapa saluran pengeringan (drainase) akibat genangan. <input type="checkbox"/> Pada beberapa wilayah tidak adanya gorong-gorong untuk saluran sekunder dan adanya saluran sekunder dan tersier tidak terawat, adanya bangunan di atas saluran, dan penutupan saluran untuk akses pertokoan, endapan dan sampah. <input type="checkbox"/> Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat yang belum maksimal dilibatkan untuk bersama-sama melakukan pemeliharaan atas saluran drainase yang ada. <input type="checkbox"/> Kendala dan permasalahan lainnya terkait dengan keterbatasan anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Meningkatkan kondisi fisik jaringan drainase yang ada serta mengembangkan jaringan drainase pada setiap pusat pemukiman yang belum mempunyai jaringan drainase. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mengoptimalkan saluran utama (primer) dengan mengembalikan kapasitas saluran dengan melakukan pemeliharaan, penggalian/pendalaman pada beberapa ruas dan muara dari saluran yang menuju Sungai Kahayan. <input type="checkbox"/> Membuat saluran drainase primer, sekunder dan tersier baru yang terintegrasi sehingga mampu mengurangi tingkat genangan di dalam wilayah Kota. <input type="checkbox"/> Membuat Drainase Primer menuju Sungai Sebangau untuk membagi beban aliran. <input type="checkbox"/> Membuat baru dan memfungsikan gorong-gorong pada saluran yang melintas jalan untuk kontinuitas saluran. <input type="checkbox"/> Menyiapkan Peraturan Daerah tentang partisipasi masyarakat untuk membuat dan memelihara saluran pada sekitar permukiman dan sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah pada saluran drainase.



Permasalahan	Arah Kebijakan	Strategi Pengembangan
yang mampu disediakan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mempercepat peningkatan dan pemeliharaan saluran drainase sehingga dapat menurunkan tingkat genangan yang muncul pada saat musim penghujan.		

Sumber : Hasil Analisa, 2018

Tabel 7.21 Strategi Pengembangan Drainase

WILAYAH	ASPEK	STRATEGI	PROGRAM STRATEGIS	PELAKU	SUMBER DANA
Semua Kawasan Prioritas	Fisik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penataan dan pembangunan sistem drainase ▪ Program Pembangunan turap/talud/brojong ▪ Mewujudkan pembangunan dan pengembangan aksesibilitas lingkungan dan prasarana drainase 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong ▪ Peningkatan kualitas dan pemeliharaan jaringan drainase primer ▪ Peningkatan kualitas dan pemeliharaan jaringan drainase tersier 	PU Ciptakarya	APBN/APBD
	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan pemberdayaan masyarakat terkait kebersihan drainase 	PU, Dinas Pasar dan Kebersihan	APBD
Semua Kawasan	Fisik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penataan dan pembangunan sistem Drainase 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong. 	PU, Pengairan	APBD

Sumber : Hasil Analisa, 2018



C. Usulan Program

Tabel 7.22 Usulan Program Drainase

WILAYAH	ASPEK	STRATEGI	PROGRAM STRATEGIS	PELAKU	JANGKA WAKTU 20 TAHUN (2013-2033)				SUMBER DANA
					2013 s/d 2018	2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	
Mendawai, Menteng baru, Mahir Mahar, Kereng Bengkirai, Bukit Tunggul	Fisik	Penataan dan pembangunan sistem drainase	Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong	PU Ciptakarya	X	X	X	X	APBD
			▪ Peningkatan Kinerja/Pemb PS Drainase Primer			X	X		
			▪ Peningkatan kualitas dan pemeliharaan jaringan drainase primer		X	X	X		
			▪ Pengawasan Pembangunan/Peningkatan Drainase		X	X	X		
		Program Pembangunan turap/talud/brojong	▪ Peningkatan kualitas dan pemeliharaan jaringan drainase tersier	PU Ciptakarya	X	X	X		APBD
			▪ Peningkatan turap,talut drainase sekunder		X	X	X		
		Mewujudkan pembangunan dan pengembangan aksesibilitas lingkungan dan prasarana drainase	▪ Mengembangkan permukiman ramah lingkungan sinergis dengan sistem drainase	PU Ciptakarya	X	X	X	X	APBD
			▪ Mengembangkan aksesibilitas perkotaan		X	X	X		
			▪ Memelihara permukiman dengan infrastruktur pendukungnya		X	X	X	X	
Semua Kawasan Prioritas	Sosial	Mewujudkan sistem drainase yang memadai bagi masyarakat MBR	▪ Peningkatan sistem jaringan drainase pada lingkungan permukiman padat	PU Ciptakarya	X	X			APBD, APBD Prov



PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
 BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA

WILAYAH	ASPEK	STRATEGI	PROGRAM STRATEGIS	PELAKU	JANGKA WAKTU 20 TAHUN (2013-2033)				SUMBER DANA
					2013 s/d 2018	2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemeliharaan dan operasional infrastruktur pengendali banjir, drainase 		X	X			
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penataan dan penertiban sempadan sungai, situ, saluran 		X	X	X	X	

Sumber : Hasil Analisa, 2018



7.4.3 Persampahan

A. Kondisi Eksisting

Saat ini sarana persampahan yang terdapat di Kota Palangka Raya masih jauh dari cukup untuk melayani produksi sampah Kota Palangka Raya. Kondisi pelayanan sarana persampahan yang ada hampir sepenuhnya digunakan untuk melayani produksi sampah di kawasan pusat kota saja. Untuk lebih jelasnya mengenai sarana persampahan lihat Tabel berikut.

Tabel 7.23 Sarana Persampahan di Kota Palangka Raya Tahun 2006

No	Jenis	Jumlah (buah)	Kapasitas
1	Dump Truck Sampah	10	180 m ³ /hari
2	Arm Roll Truck	4	120 m ³ /hari
3	Gerobak Sampah	20	25 m ³ /hari
4	TPS (Tempat Pembuangan Sampah)	177	597 m ³ /hari
5	TPA (Tempat Pembuangan Akhir)	1	10 Ha

Sumber : Hasil Analisa, 2018

Beberapa aspek yang perlu didekati dalam pengelolaan persampahan adalah aspek teknik, aspek kelembagaan dan aspek keuangan dan manajemen. Uraian dibawah ini akan membahas aspek-aspek tersebut.

1. Aspek teknik

Hal pertama yang perlu diketahui dalam mengelola persampahan adalah karakter dari sampah yang ditimbulkan oleh masyarakat perkotaan. Berbagai karakter sampah perlu dikenali, dimengerti dan difahami agar dalam menyusun sistem pengelolaan yang dimulai dari perencanaan strategi dan kebijakan serta hingga pelaksanaan penanganan sampah dapat dilakukan secara benar.

Karakter sampah dapat dikenali sebagai berikut: (1) tingkat produksi sampah, (2) komposisi dan kandungan sampah, (3) kecenderungan perubahannya dari waktu ke waktu. Karakter sampah tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran serta gaya hidup dari masyarakat perkotaan. Oleh karena itu sistem pengelolaan yang direncanakan haruslah mampu mengakomodasi perubahan-perubahan dari karakter sampah yang ditimbulkan.



Pengumpulan sampah pada lokasi timbunan sampah merupakan hal selanjutnya yang perlu diketahui, berbagai permasalahan pada kegiatan pengumpulan sampah antara lain banyaknya timbunan sampah yang terkumpul tapi tidak tertangani (diangkut/ditanam) sehingga pada saat sampah tersebut menjadi terdekomposisi dan menimbulkan bau yang akan mengganggu pernafasan dan mengundang lalat yang merupakan pembawa dari berbagai jenis penyakit.

Tempat sampah yang memadai menjadi hal yang sangat langka pada kawasan yang padat penduduknya. Sungai dianggap merupakan salah satu tempat pembuangan sampah yang paling mudah bagi masyarakat perkotaan. Hal tersebut dilakukan tanpa memikirkan apa yang akan terjadi kemudian, memang untuk sementara sampah yang dihasilkan tidak tertimbun pada lokasi penimbunan sampah tetapi untuk jangka panjang akan menyebabkan berbagai masalah yang tidak kalah besarnya.

Pengangkutan sampah umumnya dilakukan dengan menggunakan gerobak atau truk sampah yang dikelola oleh kelompok masyarakat maupun dinas kebersihan kota. Beberapa hal yang terjadi pada pengangkutan sampah tersebut adalah ceceran sampah maupun cairannya sepanjang rute pengangkutan, atau terhalangnya arus transportasi akibat truk sampah yang digunakan oleh dinas kebersihan kota mengangkut sampah.

Pada beberapa daerah yang padat penduduknya TPS sangat kecil dan tidak cukup untuk menampung sampah yang ditimbulkan. Hal tersebut akan mengakibatkan timbunan sampah yang tidak terangkat, dan bila terdekomposisi akan menimbulkan bau dan akan mengundang lalat. Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir merupakan kegiatan selanjutnya yang perlu dipikirkan. Memindahkan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara yang hanya ditimbun dan tidak ditempatkan pada tempat penampungan akan menyebabkan kesulitan pada saat memindahkan sampah tersebut. Proses pemindahan tersebut harus dilakukan cepat agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan penggunaan truk pengangkut menjadi efisien.

Di Kota Palangka Raya proses pengangkutan dari TPS ke TPA banyak yang dilakukan dengan menggunakan truk bak terbuka dan sudah bocor, sehingga sering terjadi sampah dan cairan sampah yang diangkut tersebar disekitar rute perjalanan. Hal ini menjadikan



keindahan kota terganggu karena sampah tercecer dan bau yang ditimbulkan akan mengganggu pernafasan.

Banyaknya sampah yang harus diangkut akan memerlukan banyak truk pengangkut, dengan keterbatasan jumlah truk yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan, ritasi truk pengangkut menjadi lebih tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan biaya perawatan truk pengangkut akan meningkat dan masa pakai kendaraan pengangkut akan semakin pendek.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah waktu tempuh ke TPA, jarak tempuh dan kondisi jalan yang kurang memadai menyebabkan waktu tempuh menjadi lama, sulitnya memperoleh lahan yang sesuai untuk TPA pada kawasan perkotaan menyebabkan waktu dan jarak tempuh ke TPA menjadi lebih lama dan lebih panjang.

Semakin banyaknya volume sampah yang dibuang akan memerlukan TPA yang lebih luas. Sebagai konsekuensinya diperlukan tanah yang luas sebagai tempat pembuangan dan tanah penimbun sampah di TPA. Para ahli lingkungan merekomendasikan agar pengelolaan TPA menggunakan sistem sanitary landfill, namun demikian dari sekian banyak TPA yang ada, umumnya menggunakan sistem open dumping atau controlled dumping. Baru sedikit kota yang telah menerapkan sistem sanitary landfill.

Penanganan TPA yang tidak bijaksana tersebut menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan karena bau yang ditimbulkan dari sampah yang terdekomposisi, bau tersebut kemudian akan mengundang lalat yang dapat menyebabkan berbagai penyakit menular. Selain hal tersebut tanah maupun air permukaan dan air bawah tanah terkontaminasi oleh cairan lindi yang timbul karena TPA tidak dilengkapi dengan kolam pengolah lindi. Hal tersebut menyebabkan kesulitan bagi pengelola persampahan untuk menyediakan lahan yang akan digunakan sebagai TPA karena umumnya penduduk setempat akan menolak bila sekitar daerahnya akan digunakan sebagai TPA.

2. Aspek Kelembagaan

Pada beberapa kota umumnya pengelolaan persampahan dilakukan oleh Dinas Kebersihan kota, dan khususnya di Kota Palangka Raya ditangani oleh Dinas Pasar dan Kebersihan. Sedangkan keterlibatan masyarakat maupun pihak swasta dalam menangani persampahan pada beberapa kota sudah dilakukan untuk beberapa jenis kegiatan.



Masyarakat banyak yang terlibat pada sektor pengumpulan sampah di sumber timbulan sampah, sedangkan pihak swasta umumnya mengelola persampahan pada kawasan elit dimana kemampuan membayar dari konsumen sudah cukup tinggi.

Terjadi tumpang tindih fungsi sehingga menyebabkan pengelolaan persampahan menjadi tidak efektif, karena sebagai pihak pengatur yang seharusnya mengukur kinerja keberhasilan pengelolaan sampah dan akan menerapkan sanksi bila pihak operator tidak dapat melakukannya secara baik tidak mungkin dilakukan karena pihak operator tersebut tidak lain adalah dirinya sendiri. Dengan demikian kinerja operator sulit diukur dan pelayanan cenderung menurun.

3. Aspek Keuangan dan Manajemen

Pada kawasan perkotaan dimana Dinas Kebersihan menjadi pengelola persampahan, dan dana untuk pengelolaan tersebut berasal dari pemerintah daerah dan retribusi jasa pelayanan persampahan yang berasal dari konsumen.

Pada umumnya ketersediaan dana pemerintah untuk menangani persampahan sangat kecil, demikian juga retribusi yang diperoleh dari konsumen juga sedikit. Rata-rata retribusi yang diperoleh pada Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya setiap bulannya hanya sebesar Rp. 43 Juta, sementara kebutuhan dana operasional setiap bulan mencapai jumlah Rp. 153 Juta, dengan demikian subsidi yang harus disiapkan setiap bulannya sebesar Rp. 109 Juta. Jumlah perolehan retribusi tersebut masih jauh dari biaya pemulihan yang diperlukan untuk mengelola pelayanan sampah.

Untuk menarik retribusi tersebut sering digunakan jasa petugas - petugas dari penyedia jasa lainnya, seperti PLN, PDAM. Hal tersebut disebabkan karena jumlah perolehan dari retribusi kecil dan tidak menguntungkan bila menggunakan staf dinas kebersihan untuk menarik retribusi tersebut. Hasil retribusi yang diperoleh dari pelayanan pengelolaan sampah akan semakin kecil karena banyak retribusi yang tidak tertagih, hal ini menjadi semakin sulit karena enforcement terhadap penunggak retribusi tersebut tidak dilakukan, bila enforcement tersebut tidak juga dilakukan maka kecenderungan pelanggan tidak membayar akan meningkat



Tabel 7.24 Potensi dan Masalah Persampahan Kota Palangka Raya

NO	Jenis	Potensi	Masalah
1	Jaringan Persampahan	<ul style="list-style-type: none">• Rencana Pengembangan Persampahan di Kota Palangka Raya. Pengembangan persampahan yang di lakukan untuk peningkatan dan penangan persampahan di kota Palangka Raya agar semua dapat lebih terkendali dalam penangan persampahan di Kota Palangka Raya.	<ul style="list-style-type: none">• Kurangnya fasilitas peruntukan untuk membuang sampah, sehingga masih belum tertatanya pembuangan sampah yang baik di Kota Palangka Raya.

Sumber : Hasil Analisa, 2018

B. Sasaran program

Tabel 7.25 Permasalahan, Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sampah

Permasalahan	Arah Kebijakan	Strategi Pengembangan
<input type="checkbox"/> Kondisi pelayanan sarana persampahan yang ada hampir sepenuhnya digunakan untuk melayani produksi sampah di kawasan pusat kota saja.	<input type="checkbox"/> Peningkatan pelayanan system persampahan	<input type="checkbox"/> Melakukan pengurangan timbunan sampah dengan menerapkan <i>Reduce</i> , <i>Reuse</i> dan <i>Recycle</i> (3R), dengan harapan pada tahun 2022 tercapai “zero waste”.

Sumber : Hasil Analisa, 2018

Pelayanan sistem persampahan yang tidak merata menjadi masalah utama saat ini, untuk pemeratakan pelayanan tersebut, maka strategi pengembangan dilakukan adalah pengurangan sampah dengan 3R *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle*. Strategi tersebut dapat diwujudkan dengan:

- ☐ Tidak terdapat timbunan sampah pada tempat terbuka;
- ☐ Pengumpulan sampah harus dilakukan secepat mungkin dan menjangkau seluruh kawasan perkotaan termasuk kawasan rumah tinggal, niaga, fasilitas umum dan tempat wisata;
- ☐ Sampah hanya dikumpulkan pada TPS atau kontainer sampah yang telah ditentukan;
- ☐ Sampah yang terkumpul pada TPS harus sudah diangkat ke TPA dalam waktu yang kurang dari 24 jam;



- ☐ Pengangkutan dari TPS dan dibuang ke TPA harus tidak menyebabkan kemacetan lalu lintas serta tidak menimbulkan ceceran sampah maupun cairannya di sepanjang jalan;
- ☐ Pengoperasian TPA dilakukan dengan sistem *sanitary landfill*;
- ☐ Mengoptimalkan manfaat nilai tambah dari sampah dengan menerapkan daur ulang atau melakukan pengomposan.
- ☐ Pengelolaan persampahan harus menerapkan prinsip pemulihan biaya (*full cost recovery*), dan sedapat mungkin menghindari dana subsidi dari pemerintah.



C. Usulan Program

Tabel 7.26 Program Persampahan

WILAYAH	ASPEK	STRATEGI	PROGRAM STRATEGIS	PELAKU	JANGKA WAKTU 20 TAHUN (2013-2033)				SUMBER DANA
					2013 s/d 2018	2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	
Semua Kawasan Priorotas	Fisik	Peningkatan sarana prasarana	▪ Peningkatan dan pengembangan sistem kebersihan	PU Ciptakarya Dinas Pasar dan Kebersihan	X	X	X	X	APBD, APBD Prov
			▪ Optimalisasi pengoperasian TPA dan pembangunan TPS baru		X	X			
			▪ Pembangunan incinerator skala kecil			X	X		
			▪ Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan		X	X	X		
			▪ Monitoring, evaluasi				X		
	Kelembagaan	Pelaksanaan kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat	▪ Peningkatan pemberdayaan masyarakat terkait kebersihan lingkungan	PU Ciptakarya Dinas Pasar dan Kebersihan	X	X	X		APBD, APBD Prov
			▪ Pengembangan program 3R (reuse, recycle, reduce)		X	X			
		Pelaksanaan kerjasama dengan pihak swasta	▪ Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan		X		X		
			Monitoring, evaluasi						
		Sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Pekerjaan Umum	▪ Terciptanya kebijakan Pekerjaan Umum yang komprehensif dan terpadu serta berkontribusi nyata dalam pembangunan kawasan prioritas	PU Ciptakarya Dinas Pasar dan Kebersihan	X	X	X		
			▪ Ditetapkannya Perda Pengelolaan Sampah dan peraturan turunannya			X	X		
			▪ Dipisahkannya fungsi operator dan regulator dalam pengelolaan sampah serta Terbentuknya Dewan			X			



PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
 BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA

WILAYAH	ASPEK	STRATEGI	PROGRAM STRATEGIS	PELAKU	JANGKA WAKTU 20 TAHUN (2013-2033)				SUMBER DANA
					2013 s/d 2018	2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	
			Pengelolaan Persampahan Perkotaan.						
	Pengelolaan sampah lingkungan	Pengolahan sampah menjadi barang berguna	▪ Pengembangan inovasi	PU Ciptakarya, Dinas Pasar dan Kebersihan, BLH	X	X			APBD, APBD Prov
			▪ Pelaksanaan pemilahan sampah di dalam kawasan atau tempat penampungan		X	X	X		
			▪ Pengolahan sampah organik dan pembangunan unit-unit daur ulang		X	X	X		
			▪ Pengembangan home composting di masyarakat		X	X			
			▪ Monitoring, evaluasi						
		Pengembangan kinerja pengelolaan sampah	▪ Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	PU Ciptakarya Dinas Pasar dan Kebersihan	X				APBD, APBD Prov
			▪ Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan		X	X	X		
			▪ Monitoring, evaluasi						

Sumber : Hasil Analisa, 2018



7.4.4 Sasaran Program PLP Kota Palangkaraya

Matriks sasaran program Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) di Kota Palangka Raya dapat dilihat pada tabel berikut.

Matriks Sasaran Program
Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) Kabupaten Kediri

No	Uraian Sasaran	Sasaran Program (Tahun)				
	Program	2018	2019	2020	2021	2022
1	Sistem Pengolahan Air					
	Cakupan Pelayanan	0%				
	SPAL Terpusat					
	Cakupan Pelayanan	0%				
	SPAL Setempat					
	Kapasitas IPLT	0%				
2	Pengelolaan Persampahan					
	Cakupan Pelayanan	81%	85%	90%	95%	100%
	Persampahan					
3	Drainase Permukiman					
	Luas genangan di permukiman					

Sumber : Hasil Analisa, 2018

7.4.5 Usulan Program PLP Kota Palangkaraya

Usulan dan prioritas program Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) Kota Palangkaraya tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.27 Usulan dan Prioritas Program Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP)

No	Usulan Kegiatan	Lokasi	Tahun	Volume	Satuan	Biaya (Rp 000.000)
1	Penyusunan Rencana Induk dan Pra Studi Kelayakan					
	Penyusunan FS IPLT	Kota Palangka Raya	2019	1	Laporan	30
	Penyusunan DED IPLT	Kota Palangka Raya	2019	1	Laporan	300
	Penyusunan FS IPAL	Kota Palangka Raya	2019	1	Laporan	20
	Penyusunan DED IPAL	Kota Palangka Raya	2019	1	Laporan	200
	Penyusunan Masterplan Drainase	Kota Palangka Raya	2019	1	Laporan	700
	Penyusunan DED TPA Regional	Kota Palangka Raya	2019	1	Laporan	300
2	Penyusunan Review SSK	Kota Palangka Raya	2019	1	Laporan	600
3	Infrastruktur Air Limbah					
	Pembangunan IPLT	Kota Palangka Raya	2020	1	Kawasan	110.000
	Pembangunan IPAL Komunal	Kota Palangka Raya	2020	1	Kawasan	5.500



No	Usulan Kegiatan	Lokasi	Tahun	Volume	Satuan	Biaya (Rp 000.000)
	Pembangunan Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Setempat (Offsite System)	Kecamatan Bukit Batu	2021	1	Kawasan	2.200
	Pembangunan Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Setempat (Offsite System)	Kecamatan Bukit Batu	2021	1	Kawasan	2.200
	Pembangunan Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Setempat (Offsite System)	Kecamatan Jekan Raya	2021	1	Kawasan	2.200
	Pembangunan Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Setempat (Offsite System)	Kecamatan Jekan raya	2021	1	Kawasan	2.200
	Pembangunan Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Setempat (Offsite System)	Kecamatan Jekan Raya	2021	1	Kawasan	2.200
	Pembangunan Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Setempat (Offsite System)	Kecamatan Pahandut	2021	1	Kawasan	2.200
	Pembangunan Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Setempat (Offsite System)	Kecamatan Pahandut	2021	1	Kawasan	2.200
	Pembangunan Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Setempat (Offsite System)	Kecamatan Rakumpit	2021	1	Kawasan	2.200
	Pembangunan Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Setempat (Offsite System)	Kecamatan Rakumpit	2021	1	Kawasan	2.200
	Pembangunan Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Setempat (Offsite System)	Kecamatan Sebangau	2021	1	Kawasan	2.200
	Pembangunan Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Setempat (Offsite System)	Kecamatan Sebangau	2021	1	Kawasan	2.200
	Pembangunan Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Setempat (Offsite System)	Kota Palangka Raya	2021	1	Kawasan	2.200
4	Infrastruktur Drainase Perkotaan					
	Pembangunan PS Drainase Perkotaan	Kecamatan Bukit Batu	2022	1	Kawasan	5.500



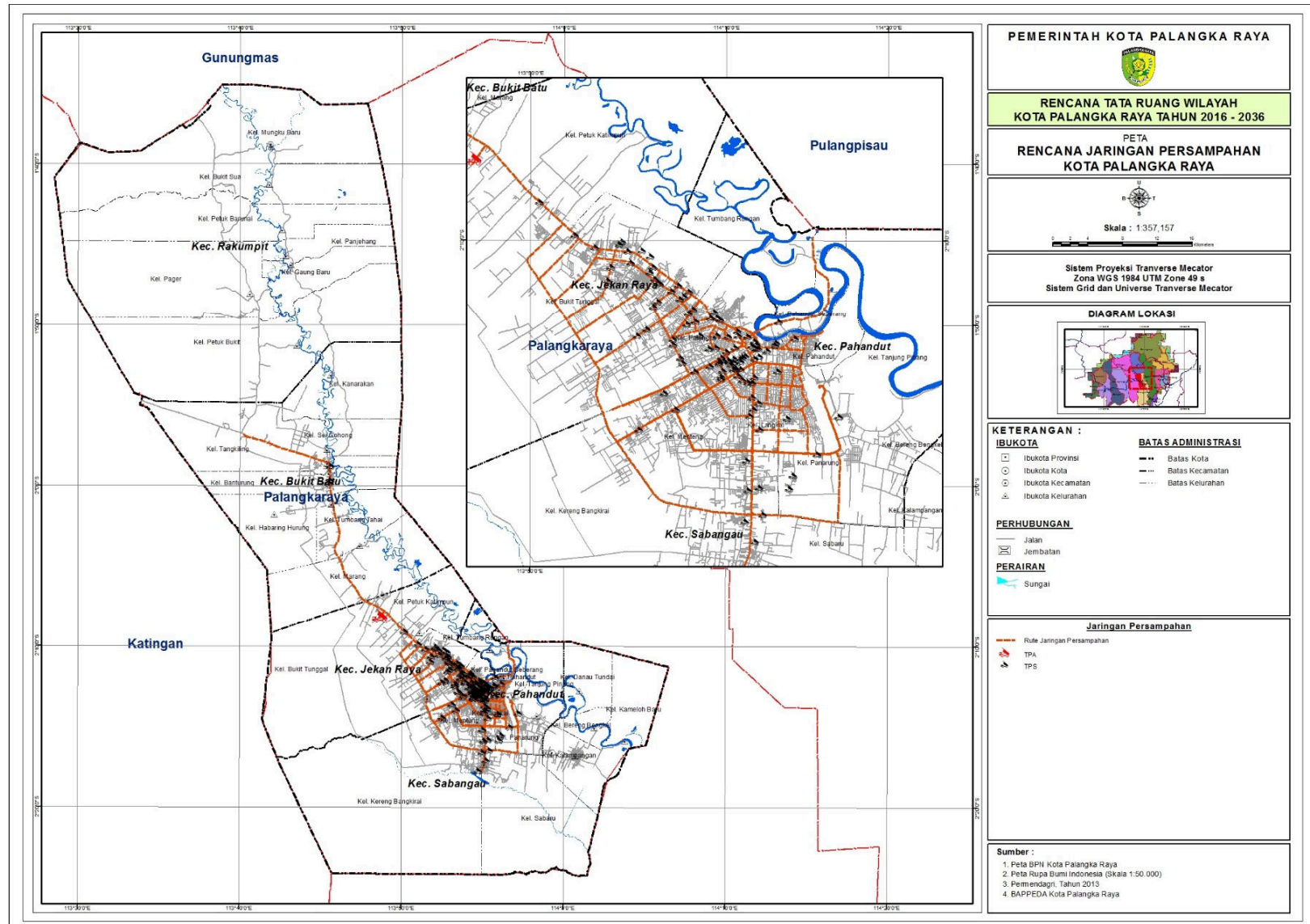
PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
 BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA

No	Usulan Kegiatan	Lokasi	Tahun	Volume	Satuan	Biaya (Rp 000.000)
	Pembangunan PS Drainase	Kecamatan Jekan Raya	2022	1	Kawasan	5.500
	Pembangunan PS Drainase	Kecamatan Pahandut	2022	1	Kawasan	5.500
	Pembangunan PS Drainase	Kecamatan Rakumpit	2022	1	Kawasan	5.500
	Pembangunan PS Drainase	Kecamatan Sebangau	2022	1	Kawasan	5.500
	Pembangunan Lubang Resapan Biopori	Kota Palangka Raya	2022	1	Kawasan	500
5	Infrastruktur Persampahan		2022			
	Rehabilitasi/Peningkatan TPA	PA Tjilik Riwut	2022	1	Kawasan	11.000
	Pembangunan TPST 3R	Kecamatan Jekan Raya	2022	1	Kawasan	660
	Pembangunan TPST 3R	Kecamatan Pahandut	2018	1	Kawasan	660
	Pembangunan TPST 3R	Kecamatan Sebangau	2019	1	Kawasan	660

Sumber : Hasil Analisa, 2018



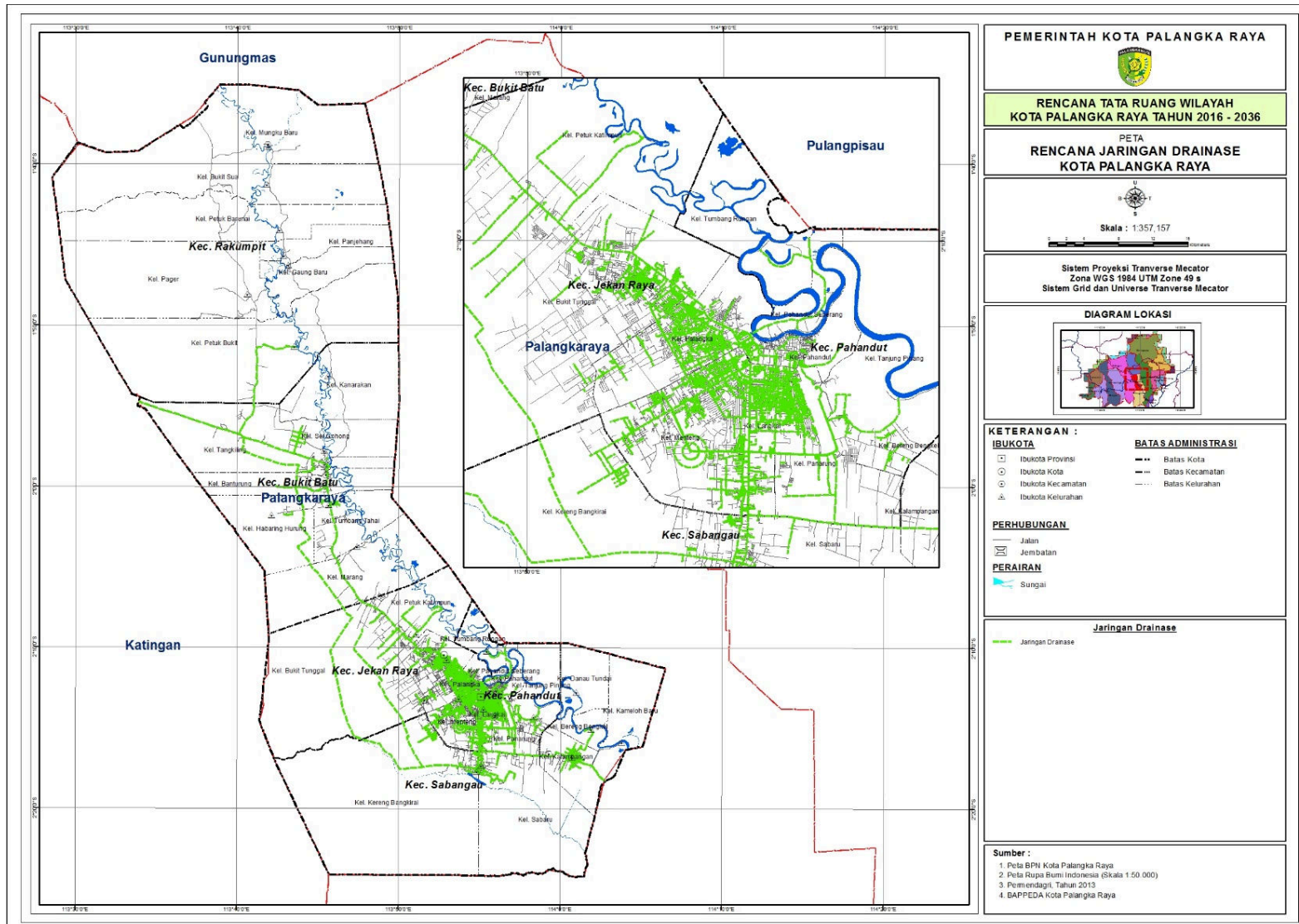
PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA



Gambar 7.8 Rencana Jaringan Persampahan Kota Palangka Raya (RTRW Kota Palangka Raya)



PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA



Gambar 7.9 Rencana Jaringan Persampahan Kota Palangka Raya (RTRW Kota Palangka Ray